



Katalog BPS: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2014



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2014



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2014

ISSN: 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1415

Katalog BPS: 2032004

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: xvi + 103 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), dan Triwulan III (Agustus) tahun 2014. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	xi
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>), dan Ketidakaktifan	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	22
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	23
3. Partisipasi Dalam Dunia Kerja (KILM 1)	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment To Population Ratio-EPR</i>)	29

4.2.	KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
4.3.	KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	37
4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja.....	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal.....	49
5.	Indikator Pengangguran	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>).....	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf.....	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf.....	71
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2014	26
Tabel 2.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014	30
Tabel 3.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2014	31
Tabel 4.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2014.....	34
Tabel 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014.....	35
Tabel 6.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2014.....	38
Tabel 7.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014.....	39
Tabel 8.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014.....	42
Tabel 9.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014.....	46
Tabel 10.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal (juta), 2014.....	50
Tabel 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2014.....	50
Tabel 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014.....	53
Tabel 13.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2014.....	57
Tabel 14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014.....	60
Tabel 15.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014.....	62
Tabel 16.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2014.....	64
Tabel 17.	Indikator Setengah Penganggur, 2014.....	65
Tabel 18.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014.....	67
Tabel 19.	Indikator Ketidakaktifan (persen), 2014.....	68
Tabel 20.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014.....	72

INDONESIA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Mei dan Agustus 2014	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2014.....	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2014	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2014.....	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Mei dan Agustus 2014.....	40
Grafik 7. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014	43
Grafik 8. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014.....	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2014	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Mei dan Agustus 2014	52
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Agustus 2014.....	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014 ...	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2014	63
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Mei dan Agustus 2014	66
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Mei dan Agustus 2014.....	69
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2014.....	73
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2014.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014.....	77
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014.....	78
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014.....	79
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2014.....	80
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014.....	81
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014.....	82
Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014.....	83
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014.....	84
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014.....	86
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2014.....	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014.....	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2014.....	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014.....	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2014.....	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014.....	94
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014.....	95

Lampiran 17 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2014	96
Lampiran 18 Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014.....	97
Lampiran 19 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014	98
Lampiran 20 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014	99
Lampiran 21 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014	100
Lampiran 22 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014.....	101
Lampiran 23 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014.....	102
Lampiran 24 Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama.....	103

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 mencapai 121,87 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 4,15 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 (126,02 juta orang) dan turun sebanyak 3,44 juta orang jika dibandingkan keadaan Februari 2014 (125,32 juta orang).

Menurunnya jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada menurunnya persentase TPAK dari 69,33 persen pada Mei 2014 menjadi 66,60 persen pada Agustus 2014, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, TPAK Agustus 2014 juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 2,57 persen dari angka 69,17 persen.

Secara nasional angka EPR pada Agustus 2014 adalah sebesar 62,64. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja pada Agustus 2014. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Mei 2014 maupun Februari 2014, masing-masing menurun sebesar 2,75 poin dan 2,59 poin.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2014 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2014 dan Mei 2014).

Persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (48,37 persen; 55,44 juta orang), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (36,97 persen; 42,38 juta orang) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (14,66 persen; 16,81 juta orang).

Pada Agustus 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,84 persen (51,40 juta orang), urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 34,00 persen (38,97 juta orang), dan disusul sektor manufaktur sebesar 21,16 persen (24,26 juta orang).

Pada Agustus 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,76 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 (22,59 persen), serta mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (22,34 persen). Hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-

laki, yaitu masing-masing sebesar 33,04 persen dan 16,55 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai hampir dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Agustus 2014 mencapai 33,61 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Mei 2014 (32,32 persen) dan Februari 2014 (33,47 persen), masing-masing sebesar 1,29 persen poin dan 0,14 persen poin.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa dari 114,63 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,24 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (61,03 juta orang). Pada periode Februari 2014, Mei 2014, dan Agustus 2014 tampak pula adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2014 sebesar 53,59 persen, turun menjadi 53,47 persen pada Mei 2014, dan kembali turun pada Agustus 2014 menjadi 53,24 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2014 mencapai 46,41 persen, naik menjadi 46,53 persen pada Mei 2014, dan naik pada Agustus 2014 hingga mencapai 46,76 persen.

TPT pada Agustus 2014 sebesar 5,94 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2014, menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami sedikit fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 maupun Februari 2014. Seperti yang terlihat pada Tabel 12, TPT pada Agustus 2014 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,26 persen poin bila dibandingkan Mei 2014 (5,68 persen), tetapi naik sebesar 0,24 persen poin dibandingkan Februari 2014 (5,70 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 22,20 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 22 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 3,48 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Mei dan naik sebesar 5,15 persen poin apabila dibandingkan Februari 2014.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 10,17 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,42 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Agustus 2014, mencapai 9,68 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 6,06 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,62 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2014, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,69 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 2,99 juta orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 33,40 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 33,40 persen.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2014 meningkat baik dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 maupun Agustus 2014. Jika dibandingkan dengan Mei 2014, tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,73 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 naik sebesar 2,57 persen poin. Sejalan dengan peningkatan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Mei 2014–Agustus 2014), jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 5,37 juta orang dari 55,75 juta

orang pada Mei 2014 menjadi 61,12 juta orang pada Agustus 2014.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Mei 2014. Angkatan kerja pada Agustus 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 59,33 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,58 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,77 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,32 persen.

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. BPS sejak Triwulan I Februari 2011

menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–Agustus 2014, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan pada Februari, Mei, dan Agustus 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan
Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa

contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang

layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong

penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga

kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel

bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan

ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat

ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

2. PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas

maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumur,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu

jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
 6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
 8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (UNDEREMPLOYMENT), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak

memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat

pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (Underemployment)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang

dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.

- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada

pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya

tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh

karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi *L* (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 mencapai 121,87 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 4,15 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 (126,02 juta orang) dan turun sebanyak 3,44 juta orang jika dibandingkan keadaan Februari 2014 (125,32 juta orang), lihat Lampiran 3. Menurunnya jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada menurunnya persentase TPAK dari 69,33 persen pada Mei 2014 menjadi 66,60 persen pada Agustus 2014, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, TPAK Agustus 2014 juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 2,57 persen dari angka 69,17 persen.

Biasanya TPAK laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut terlihat pada keadaan Agustus 2014, dimana TPAK laki-laki mencapai 83,05 persen sementara pada perempuan hanya 50,22 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 83 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia

kerja perempuan, hanya sekitar 50 orang yang termasuk angkatan kerja. Pola yang sama juga terjadi pada periode Mei 2014, dimana TPAK laki-laki (85,05 persen) lebih tinggi dibanding TPAK perempuan (53,68 persen). Begitu pula pada Februari 2014, TPAK laki-laki (85,04 persen) lebih tinggi dibanding TPAK perempuan (53,37 persen).

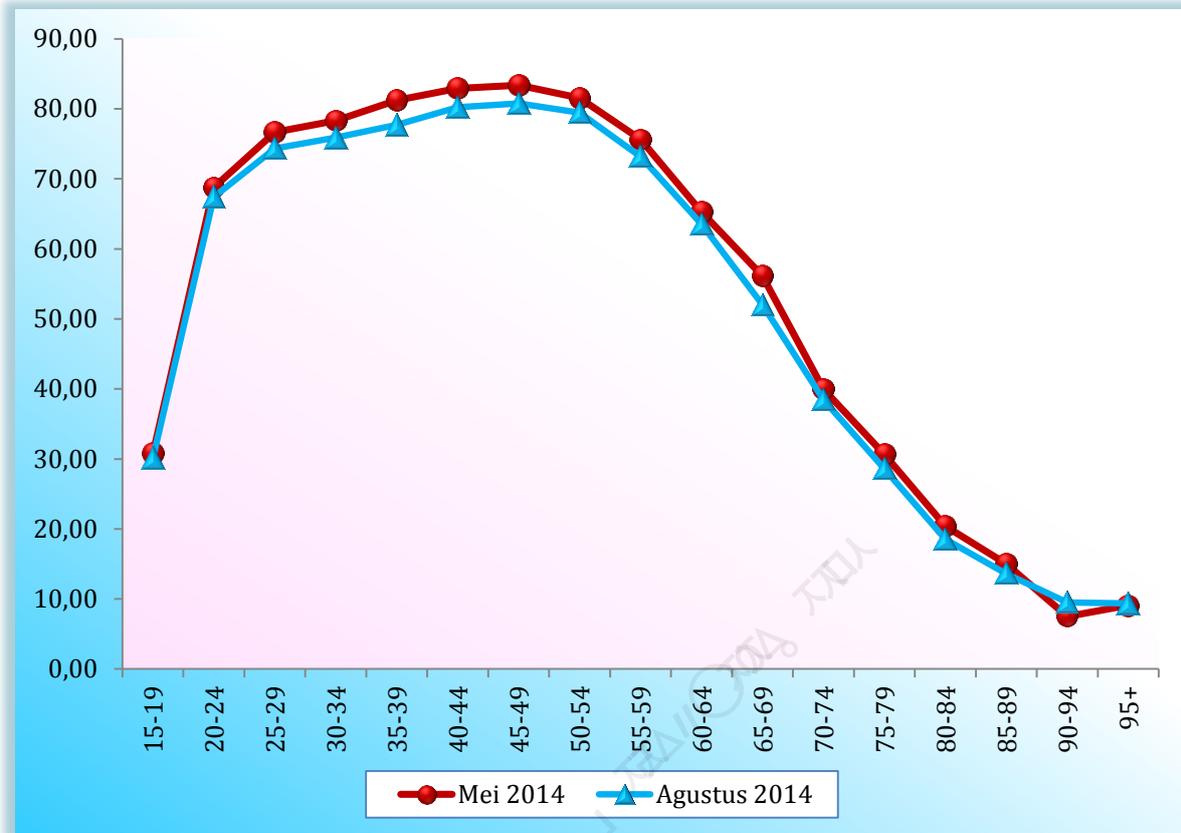
Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa Sakernas periode Mei–Agustus 2014 terjadi penurunan TPAK pada semua kelompok umur, penurunan terbesar adalah pada kelompok umur 15–24 tahun yaitu menurun sebesar 3,20 persen poin. Begitu juga pada periode Februari–Agustus 2014, penurunan TPAK juga terjadi pada semua kelompok umur, penurunan terbesar juga terjadi pada kelompok umur 15–24 tahun yang menurun sebesar 3,49 persen poin.

Grafik 1 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur 5 tahunan, TPAK terlihat menurun hampir pada semua kelompok umur, hanya kelompok umur 90–94 tahun dan kelompok umur 95 tahun ke atas yang mengalami kenaikan, yaitu masing-masing naik sebesar 2,00 persen poin dan 0,26 persen poin.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2014

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	69,17	69,33	66,60
Laki-laki	85,04	85,05	83,05
Perempuan	53,37	53,68	50,22
Perkotaan	67,18	67,35	64,47
Perdesaan	71,23	71,37	68,80
(15–64)	71,28	71,46	68,81
Laki-laki	86,92	87,00	85,09
Perempuan	55,45	55,75	52,36
Perkotaan	69,42	69,57	66,85
Perdesaan	73,22	73,44	70,87
(15–24)	49,79	49,50	46,30
Laki-laki	60,47	60,27	55,51
Perempuan	38,83	38,45	36,82
Perkotaan	48,93	48,19	45,58
Perdesaan	50,72	50,91	47,08
(25–54)	79,99	80,42	77,85
Laki-laki	97,86	98,15	97,18
Perempuan	62,06	62,65	58,48
Perkotaan	78,65	79,13	76,30
Perdesaan	81,40	81,78	79,48
(25–34)	77,29	77,49	75,18
Laki-laki	97,32	97,54	96,49
Perempuan	57,36	57,53	53,93
Perkotaan	77,25	77,40	75,18
Perdesaan	77,35	77,59	75,19
(35–54)	81,67	82,26	79,49
Laki-laki	98,21	98,53	97,60
Perempuan	65,03	65,87	61,29
Perkotaan	79,56	80,26	77,02
Perdesaan	83,84	84,30	82,02
(55–64)	71,35	71,17	68,93
Laki-laki	86,48	86,00	84,87
Perempuan	55,82	56,01	52,61
Perkotaan	64,09	64,39	61,49
Perdesaan	78,32	77,64	75,88
65 Tahun ke atas	41,02	40,70	38,33
Laki-laki	56,71	55,56	53,99
Perempuan	28,37	28,65	25,51
Perkotaan	32,65	33,14	30,44
Perdesaan	47,75	46,80	44,99

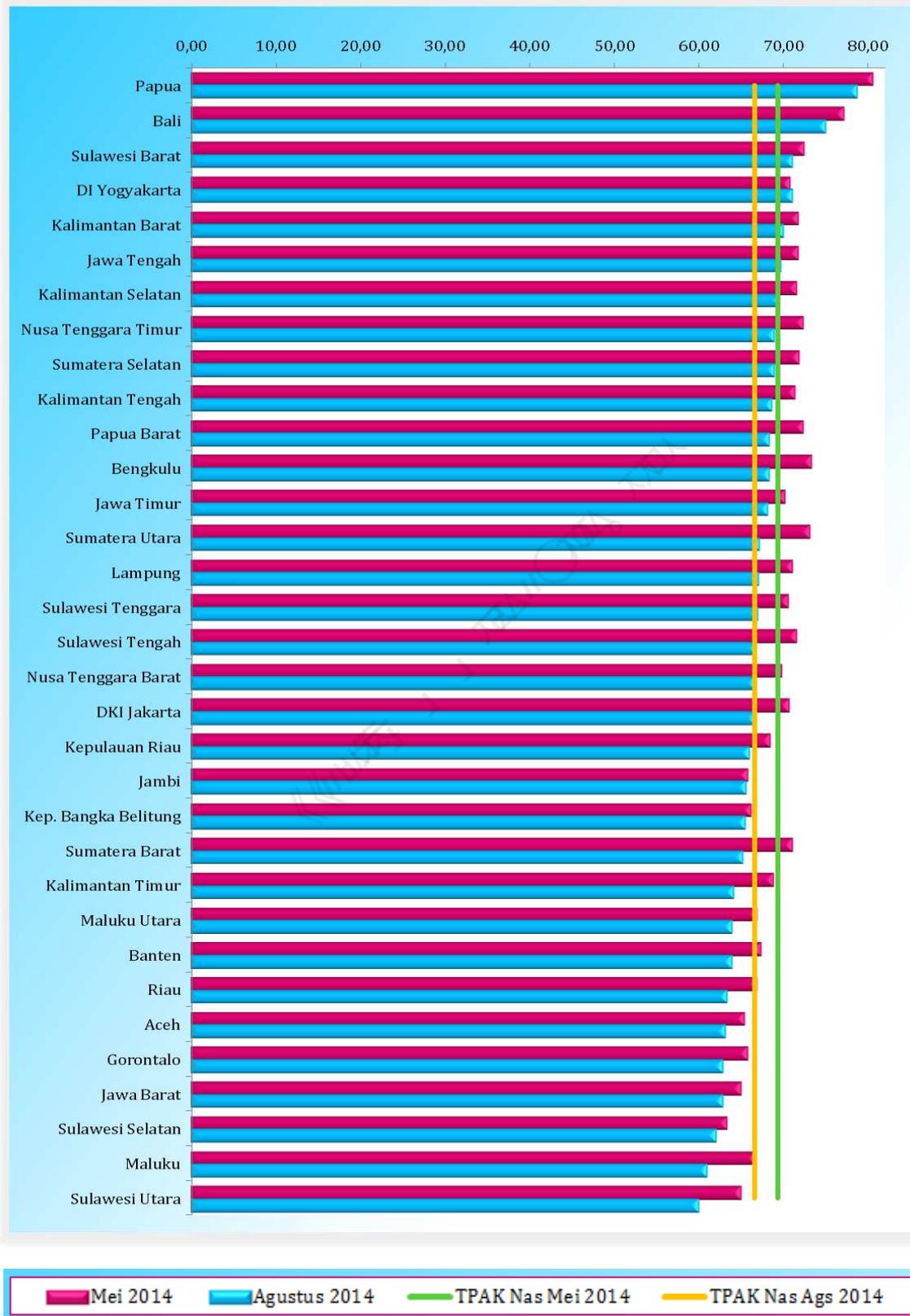
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Mei dan Agustus 2014



TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (78,67), Provinsi Bali (74,91) dan Provinsi Sulawesi Barat (71,06). Kedudukan TPAK tersebut berada di atas TPAK nasional yang hanya sebesar 66,60 persen. Jika dibandingkan keadaan Mei 2014 kedudukan provinsi tersebut hanya berubah di urutan ketiga, dimana Provinsi dengan TPAK tertinggi diduduki oleh Provinsi Papua (80,58), Provinsi Bali (77,07) dan Provinsi Bengkulu (73,24).

Sedangkan untuk provinsi dengan TPAK terendah pada Agustus 2014 ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Utara (59,99 persen), Provinsi Maluku (60,92 persen), dan Provinsi Sulawesi Selatan (62,04 persen). Tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah berbeda jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2014, dimana posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (63,32 persen), Provinsi Jawa Barat (64,94 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (64,98 persen) (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014



4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR)

Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah EPR, secara nasional angka EPR pada Agustus 2014 adalah sebesar 62,64. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 63 orang yang bekerja pada Agustus 2014. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Mei 2014 maupun Februari 2014, masing-masing menurun sebesar 2,75 poin dan 2,59 poin.

Pada periode Februari 2014, Mei 2014 maupun Agustus 2014, dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali dibandingkan EPR perempuan. Sebagai contoh pada Agustus 2014, EPR laki-laki pada periode ini adalah sebesar 78,27 sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 47,08.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2014 EPR daerah perkotaan (59,88) lebih rendah dibanding EPR daerah perdesaan (65,49). Begitu pula untuk periode Mei 2014 dan Februari 2014, dimana wilayah Perkotaan EPR-nya lebih rendah dibanding wilayah perdesaan.

EPR daerah perkotaan periode Mei 2014-Agustus 2014 mengalami penurunan, yaitu menurun sebesar 2,83 poin sedangkan untuk wilayah perdesaan juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 2,67 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode Mei-Agustus 2014 menurun sebesar 4,21 poin dari 40,23 menjadi 36,02. Begitu pula pada periode Februari 2014-Agustus 2014 EPR penduduk kelompok umur muda juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 5,28 poin.

Hal yang sama juga terjadi pada penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun keatas), pada periode Mei-Agustus 2014 EPR penduduk umur dewasa juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 2,42 poin, dari 73,36 menjadi 70,94. Pada periode Februari-Agustus 2014 EPR pada kelompok umur dewasa juga mengalami penurunan, yaitu menurun sebesar 1,86 poin dari angka 72,80 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke atas	181,17	181,77	182,99
Laki-laki	90,38	90,68	91,30
Perempuan	90,79	91,09	91,69
Perkotaan	91,96	92,30	92,93
Perdesaan	89,21	89,47	90,07
Umur Muda (15–24)	43,58	43,73	43,47
Laki-laki	22,08	22,15	22,05
Perempuan	21,50	21,58	21,42
Perkotaan	22,57	22,65	22,50
Perdesaan	21,01	21,08	20,98
Umur Dewasa (25+)	137,59	138,04	139,52
Laki-laki	68,30	68,53	69,25
Perempuan	69,29	69,51	70,27
Perkotaan	69,39	69,64	70,43
Perdesaan	68,20	68,40	69,09
Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja	118,17	118,86	114,63
Laki-laki	72,54	72,85	71,46
Perempuan	45,63	46,01	43,16
Perkotaan	57,47	57,88	55,64
Perdesaan	60,70	60,98	58,98
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	18,00	17,59	15,66
Laki-laki	11,03	10,81	9,58
Perempuan	6,97	6,78	6,08
Perkotaan	8,92	8,66	7,77
Perdesaan	9,07	8,93	7,89
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	100,17	101,27	98,97
Laki-laki	61,51	62,04	61,88
Perempuan	38,66	39,23	37,09
Perkotaan	48,55	49,22	47,88
Perdesaan	51,62	52,05	51,09

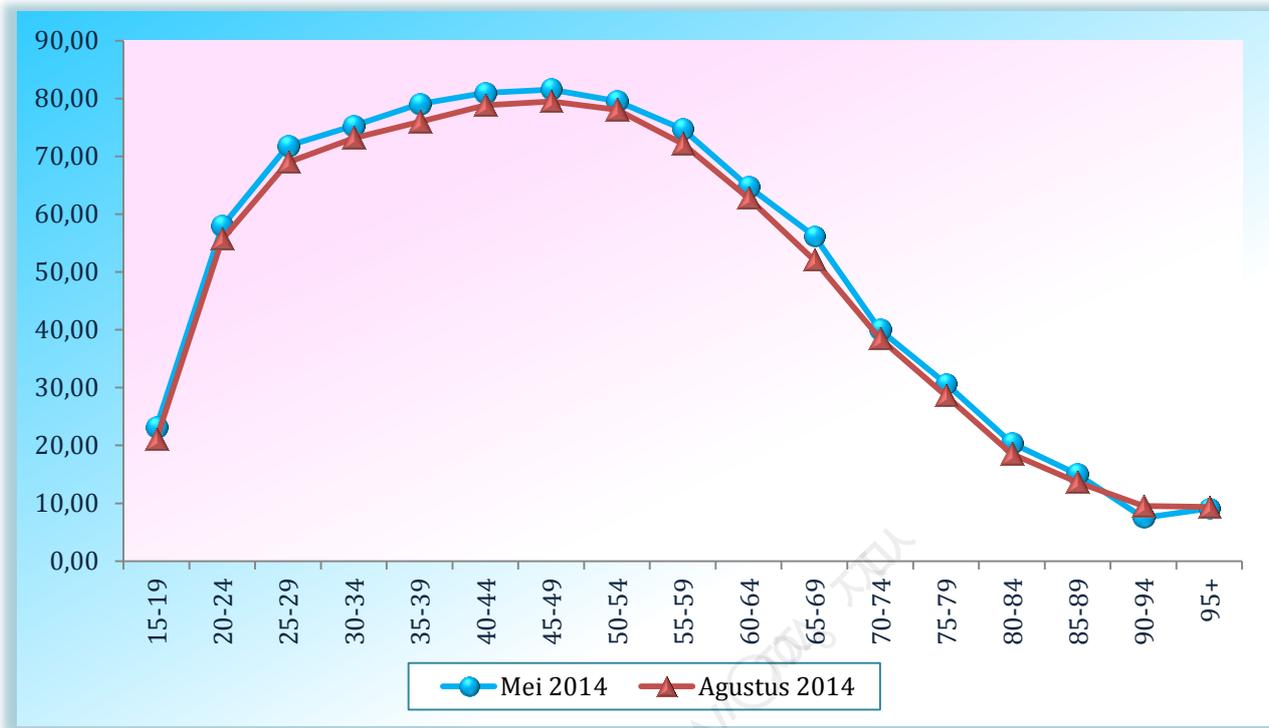
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2014

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	65,23	65,39	62,64
Laki-laki	80,26	80,34	78,27
Perempuan	50,26	50,52	47,08
Perkotaan	62,50	62,71	59,88
Perdesaan	68,04	68,16	65,49
Umur Muda (15–24)	41,30	40,23	36,02
Laki-laki	49,94	48,79	43,45
Perempuan	32,43	31,45	28,37
Perkotaan	39,55	38,24	34,53
Perdesaan	43,18	42,38	37,62
Umur Dewasa (25+)	72,80	73,36	70,94
Laki-laki	90,06	90,54	89,36
Perempuan	55,79	56,43	52,78
Perkotaan	69,96	70,67	67,98
Perdesaan	75,69	76,11	73,95

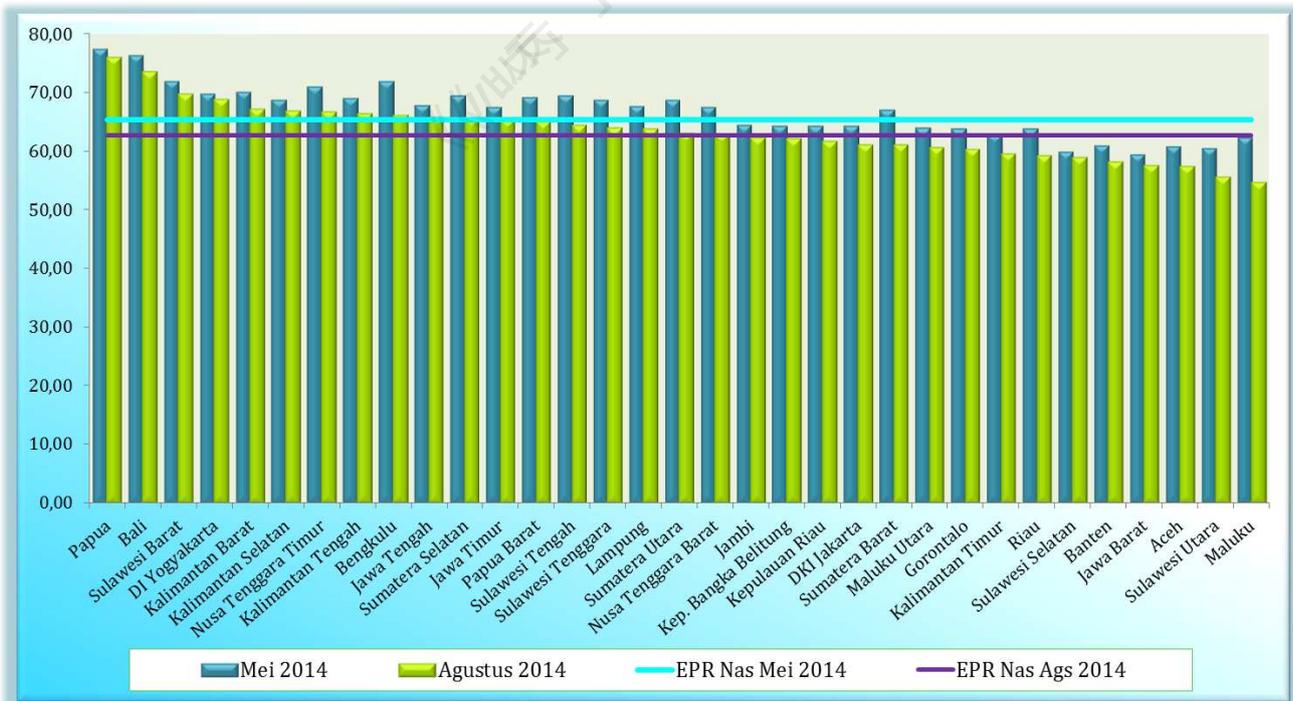
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 1. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik 3 terlihat bahwa puncak EPR untuk keadaan Agustus 2014 ini berada pada kelompok umur 45-49 tahun dengan EPR 79,46. Grafik EPR periode Agustus 2014 dan Mei 2014 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, namun pada kelompok umur 65-69 tahun grafik terlihat agak bergeser.

Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Agustus 2014, yaitu Provinsi Papua (75,96), Provinsi Bali (73,48), dan Provinsi Sulawesi Barat (69,58). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Maluku (54,52), Provinsi Sulawesi Utara (55,47), dan Provinsi Aceh (57,38). Ketiga provinsi dengan EPR terendah ini berada jauh dari nilai EPR rata-rata nasional yaitu 62,64.

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2014



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2014



4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2014 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2014 dan Mei 2014). Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (48,37 persen; 55,44 juta orang), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (36,97 persen; 42,38 juta orang) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (14,66 persen; 16,81 juta orang).

Pada Tabel 5, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami peningkatan sebesar 0,75 persen poin untuk periode Mei–Agustus 2014, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen poin, hanya penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga yang mengalami penurunan sebesar 0,94 persen poin.

Jika dibandingkan dengan periode Februari–Agustus 2014, penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami peningkatan sebesar 1,24 persen poin, buruh/karyawan/pegawai meningkat sebesar 0,29 persen, dan pekerja keluarga menurun sebesar 1,53 persen.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada Agustus 2014 mencapai 59,38 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 59 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2014, maupun Februari 2014 persentase pekerja rentan terus mengalami penurunan masing-masing menurun sebesar 0,37 persen poin dan 0,43 persen poin.

Keadaan pekerja rentan menurut jenis kelamin pada Februari 2014, Mei 2014 maupun Agustus 2014 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, sebagai fakta pada Agustus 2014 ini persentase pekerja rentan perempuan sebesar 64,13 persen dan pekerja rentan laki-laki sebesar 56,52 persen.

Provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Agustus 2014, yaitu Provinsi Papua (82,67 persen), Nusa Tenggara Timur (78,91 persen), dan Nusa Tenggara Barat (74,13 persen). Jika dibandingkan dengan Mei 2014 persentase terbesar pekerja rentan masih terdapat pada ketiga provinsi tersebut, hanya persentasenya saja yang berubah dimana Provinsi Papua sebesar 82,35 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 79,45 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 76,10 persen (Grafik 5).

Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2014

Status Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	118,17	118,86	114,63
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	43,35	43,72	42,38
Berusaha	55,69	56,60	55,44
Pengusaha	4,14	4,12	4,18
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	40,06	40,35	39,76
Pekerja bebas	11,49	12,13	11,50
Pekerja keluarga	19,13	18,54	16,81
Pekerja rentan*)	70,68	71,02	68,07
Laki-laki	72,54	72,85	71,46
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	28,19	28,55	27,75
Berusaha	39,42	39,57	39,36
Pengusaha	3,38	3,34	3,32
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	27,25	27,22	27,28
Pekerja bebas	8,79	9,01	8,76
Pekerja keluarga	4,93	4,73	4,35
Pekerja rentan*)	40,97	40,96	40,39
Perempuan	45,63	46,01	43,16
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	15,16	15,17	14,63
Berusaha	16,27	17,03	16,08
Pengusaha	0,77	0,78	0,85
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	12,80	13,13	12,48
Pekerja bebas	2,70	3,12	2,75
Pekerja keluarga	14,20	13,81	12,45
Pekerja rentan*)	29,71	30,06	27,68

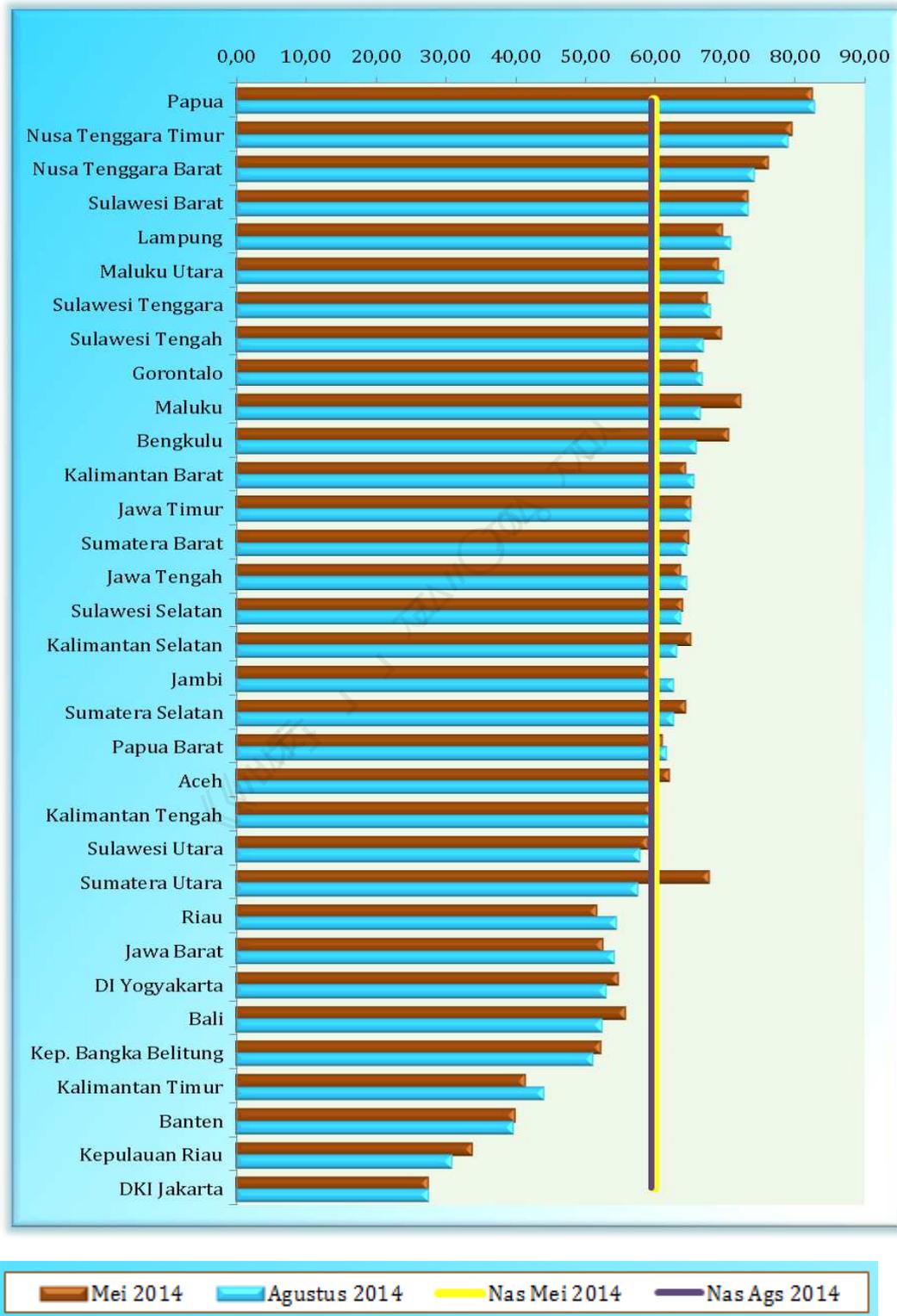
Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014

Status Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,68	36,78	36,97
Berusaha	47,13	47,62	48,37
Pengusaha	3,51	3,47	3,65
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	33,90	33,95	34,69
Pekerja bebas	9,72	10,20	10,03
Pekerja keluarga	16,19	15,60	14,66
Pekerja rentan*)	59,81	59,75	59,38
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,87	39,19	38,83
Berusaha	54,34	54,32	55,08
Pengusaha	4,65	4,59	4,65
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	37,57	37,37	38,17
Pekerja bebas	12,12	12,36	12,26
Pekerja keluarga	6,79	6,49	6,09
Pekerja rentan*)	56,48	56,22	56,52
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	33,21	32,97	33,90
Berusaha	35,66	37,01	37,25
Pengusaha	1,69	1,70	1,97
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	28,05	28,53	28,92
Pekerja bebas	5,92	6,78	6,36
Pekerja keluarga	31,13	30,02	28,85
Pekerja rentan*)	65,10	65,33	64,13

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Mei dan Agustus 2014



4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Agustus 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,84 persen (51,40 juta orang), urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 34,00 persen (38,97 juta orang), dan disusul sektor manufaktur sebesar 21,16 persen (24,26 juta orang).

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan sebesar 21,66 persen dan sektor jasa kemasyarakatan 16,07 persen. Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri dan sektor bangunan dengan persentase masing-masing sebesar 13,31 persen dan 6,35 persen.

Periode Sakernas Mei–Agustus 2014 menunjukkan sedikit perubahan, dimana sektor jasa-jasa naik sebesar 0,57 persen poin, sektor manufaktur juga mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen poin sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin.

Begitu pula pada periode Sakernas Februari–Agustus 2014, sektor manufaktur dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,40 persen poin dan 0,16 persen poin sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,56 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2014 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (70,59 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Kepulauan Riau (33,87 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (79,59 persen).

Kondisi ini tidak mengalami perubahan di mana pada periode Mei persentase tertinggi sektor pertanian masih berada di Provinsi Papua yang mencapai 74,29 persen. Provinsi DKI Jakarta dengan persentase penduduk tertinggi penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa yang mencapai 79,25 persen. Hanya sektor manufaktur yang mengalami perubahan dimana posisi tertinggi diduduki oleh Provinsi Bangka Belitung (32,34 persen), lihat Lampiran 9.

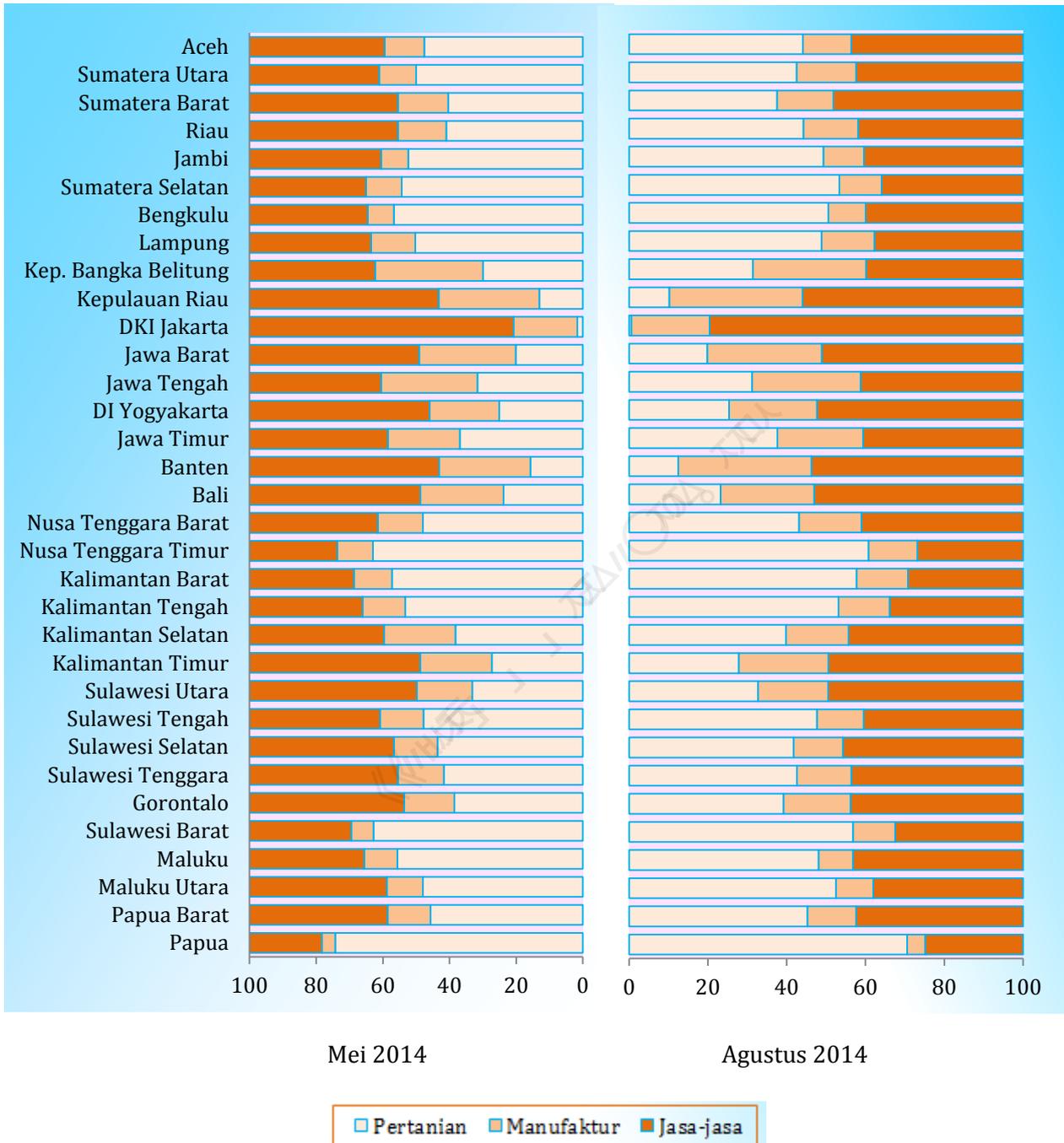
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	118,17	118,86	114,63
Pertanian	40,83	41,72	38,97
Manufaktur	24,54	24,52	24,26
Pertambangan	1,63	1,51	1,44
Industri	15,39	15,34	15,25
Listrik, Gas dan Air	0,31	0,27	0,29
Bangunan	7,21	7,40	7,28
Jasa-jasa	52,80	52,62	51,40
Perdagangan	25,81	25,81	24,83
Transportasi	5,32	4,99	5,12
Keuangan	3,19	3,23	3,03
Jasa Kemasyarakatan	18,48	18,59	18,42
Laki-laki	72,54	72,86	71,46
Pertanian	25,38	25,76	24,79
Manufaktur	17,94	17,99	17,73
Pertambangan	1,45	1,37	1,31
Industri	9,17	9,14	9,08
Listrik, Gas dan Air	0,28	0,24	0,26
Bangunan	7,04	7,24	7,08
Jasa-jasa	29,22	29,11	28,94
Perdagangan	12,10	12,16	12,02
Transportasi	4,95	4,71	4,80
Keuangan	2,27	2,29	2,18
Jasa Kemasyarakatan	9,90	9,95	9,94
Perempuan	45,63	46,02	43,16
Pertanian	15,46	15,97	14,18
Manufaktur	6,59	6,53	6,52
Pertambangan	0,17	0,14	0,12
Industri	6,23	6,20	6,18
Listrik, Gas dan Air	0,03	0,03	0,02
Bangunan	0,17	0,16	0,20
Jasa-jasa	23,58	23,52	22,46
Perdagangan	13,71	13,65	12,82
Transportasi	0,37	0,28	0,31
Keuangan	0,92	0,94	0,85
Jasa Kemasyarakatan	8,58	8,65	8,48

Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,56	35,10	34,00
Manufaktur	20,76	20,63	21,16
Pertambangan	1,38	1,27	1,25
Industri	13,02	12,91	13,31
Listrik, Gas dan Air	0,26	0,23	0,25
Bangunan	6,10	6,22	6,35
Jasa-jasa	44,68	44,27	44,84
Perdagangan	21,84	21,71	21,66
Transportasi	4,50	4,20	4,46
Keuangan	2,70	2,72	2,65
Jasa Kemasyarakatan	15,64	15,64	16,07
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,99	35,36	34,69
Manufaktur	24,73	24,69	24,82
Pertambangan	2,00	1,88	1,84
Industri	12,63	12,55	12,70
Listrik, Gas dan Air	0,39	0,33	0,37
Bangunan	9,71	9,93	9,91
Jasa-jasa	40,28	39,95	40,49
Perdagangan	16,68	16,70	16,81
Transportasi	6,83	6,46	6,72
Keuangan	3,13	3,14	3,05
Jasa Kemasyarakatan	13,64	13,65	13,91
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Pertanian	33,87	34,70	32,85
Manufaktur	14,45	14,20	15,12
Pertambangan	0,38	0,31	0,28
Industri	13,64	13,47	14,31
Listrik, Gas dan Air	0,06	0,06	0,06
Bangunan	0,37	0,36	0,47
Jasa-jasa	51,68	51,10	52,03
Perdagangan	30,04	29,65	29,69
Transportasi	0,81	0,62	0,72
Keuangan	2,02	2,04	1,97
Jasa Kemasyarakatan	18,81	18,79	19,65

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Mei dan Agustus 2014



4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Pada Agustus 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,76 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 (22,59 persen), serta mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (22,34 persen). Hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,04 persen dan 16,55 persen (Tabel 8).

Apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014, tingkat pekerja paruh waktu

perempuan pada Agustus 2014 mengalami penurunan sebesar 0,80 persen poin (dari 33,84 persen menjadi 33,04 persen). Berbeda halnya dengan pekerja paruh waktu laki-laki yang mengalami kenaikan 1,06 persen poin (dari 15,49 persen menjadi 16,55 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, masih membandingkan dengan keadaan Mei 2014, tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2014 mengalami penurunan di wilayah perkotaan sebesar 1,07 persen poin, sebaliknya di wilayah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen poin.

Begitu pula jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 penurunan terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu di daerah perkotaan, sementara di daerah perdesaan mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu berdasarkan jenis kelamin.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Agustus 2014 (Grafik 7; Lampiran 10), tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (41,15 persen), posisi kedua diduduki oleh Provinsi NTT (37,44 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (35,87 persen). Sedikit berbeda jika dibandingkan Sakernas Mei 2014, provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat, posisi kedua diduduki oleh Provinsi Jambi, dan posisi

ketiga diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah pada Agustus 2014 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (7,44 persen), Kepulauan Riau (10,51 persen) dan Banten

(12,40 persen). Ketiga peringkat provinsi ini juga menjadi provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada periode Sakernas Mei 2014 (Grafik 7; Lampiran 10).

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014

Indikator	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	22,34	22,59	22,76
Laki-laki	15,63	15,49	16,55
Perempuan	33,02	33,84	33,04
Perkotaan	14,75	15,14	14,07
Perdesaan	29,53	29,67	30,96
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	57,06	57,98	54,67

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas Agustus 2014 mencapai 54,67 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 55 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Agustus 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 maupun Februari 2014, dengan penurunan masing-masing sebesar 3,31 persen poin dan 2,39 persen poin (Tabel 8).

Grafik 8 dan Lampiran 10 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi pada

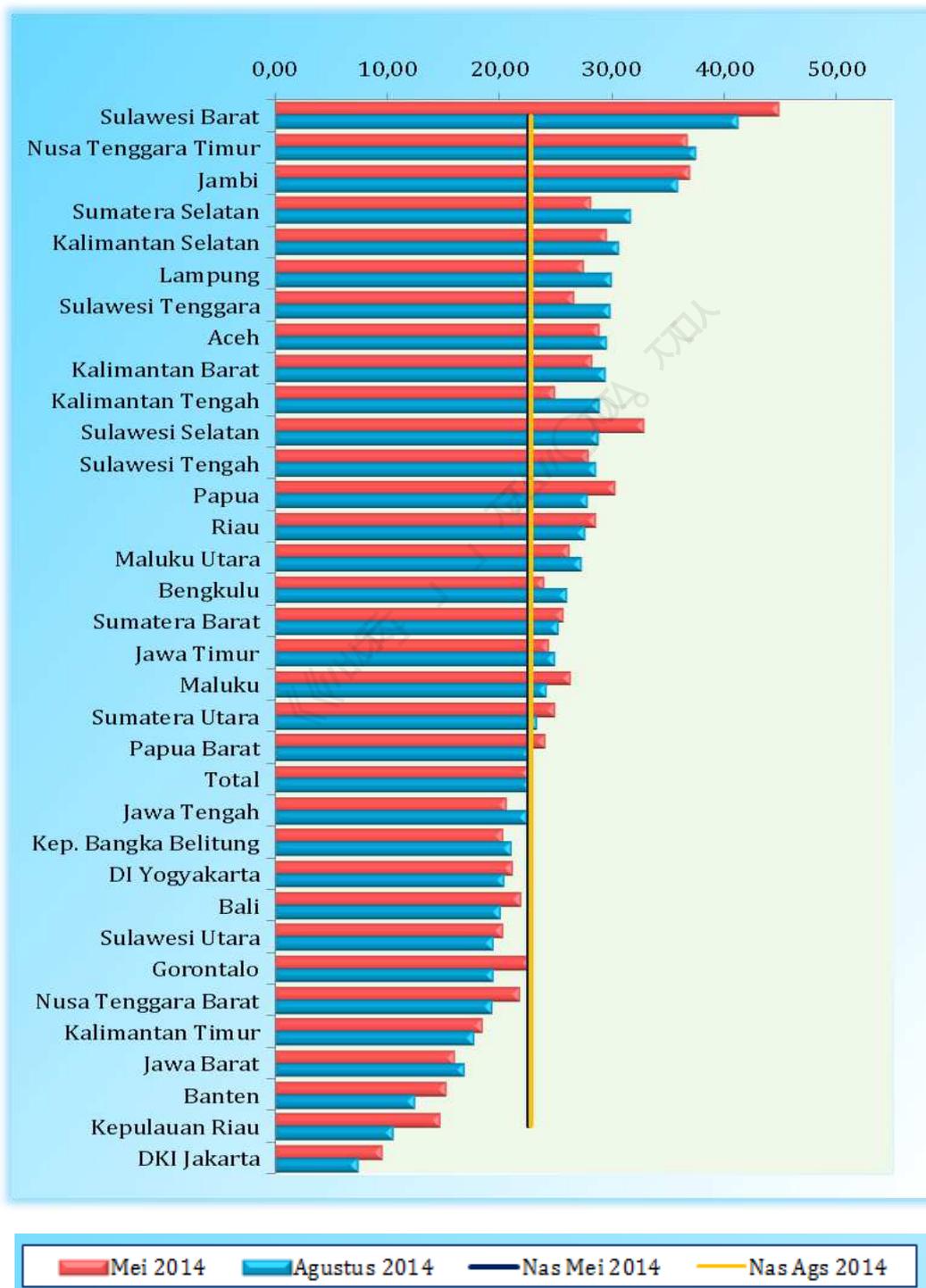
Agustus 2014 terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (63,04 persen), Provinsi DKI Jakarta (61,12 persen) dan Provinsi Bali (60,68 persen). Sedangkan pada periode Sakernas Mei 2014, provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Maluku Utara (65,11 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (63,67 persen), dan Provinsi Provinsi DKI Jakarta (62,80 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 42,03 persen, Provinsi Jambi sebesar 44,12 persen, dan Provinsi Riau sebesar 44,44 persen. Sedangkan pada periode

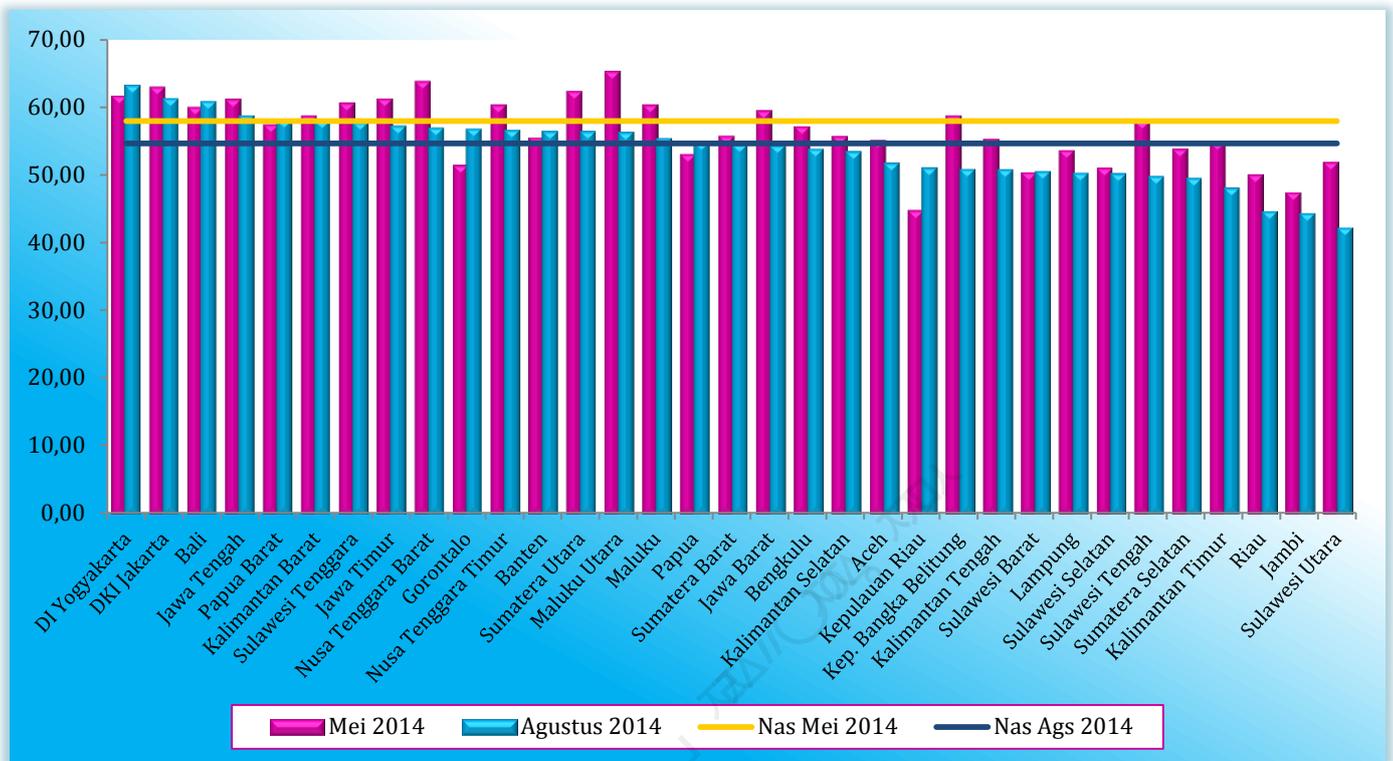
Sakernas Mei 2014, provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (44,56

persen), Provinsi Jambi (47,22 persen), dan Provinsi Riau (49,85 persen).

Grafik 7. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014



Grafik 8. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen),
Mei dan Agustus 2014



4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai hampir dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Agustus 2014 mencapai 33,61 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Mei 2014 (32,32 persen) dan Februari 2014 (33,47 persen), masing-masing sebesar 1,29 persen poin dan 0,14 persen poin.

Dapat dicermati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode Februari, Mei, dan Agustus 2014 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Seperti yang terjadi pada Agustus 2014, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 43,58 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 27,60 persen.

Apabila kita amati, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut

terjadi baik pada Februari, Mei, maupun Agustus 2014. Hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 44,94 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 21,61 persen.

Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 30,76 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 25,97 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Agustus 2014, persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 21,67 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 28,57 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014

Jumlah Jam Kerja	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,19	1,61	2,41
1–14 jam	6,16	5,87	5,83
15–24 jam	11,67	11,22	11,97
25–34 jam	13,45	13,62	13,40
35–39 jam	10,09	9,97	9,66
40–48 jam	30,38	30,84	30,76
49–59 jam	14,93	15,58	14,78
60 jam ke atas	11,13	11,29	11,19
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,33	1,65	2,58
1–14 jam	3,85	3,50	3,66
15–24 jam	8,44	7,96	9,22
25–34 jam	12,10	11,86	12,14
35–39 jam	9,55	9,46	9,14
40–48 jam	34,82	35,78	34,69
49–59 jam	17,42	18,15	17,21
60 jam ke atas	11,49	11,64	11,36
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,97	1,56	2,13
1–14 jam	9,83	9,64	9,43
15–24 jam	16,81	16,37	16,52
25–34 jam	15,61	16,40	15,50
35–39 jam	10,94	10,77	10,50
40–48 jam	23,31	23,01	24,25
49–59 jam	10,98	11,52	10,76
60 jam ke atas	10,55	10,73	10,91

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014 (lanjutan)

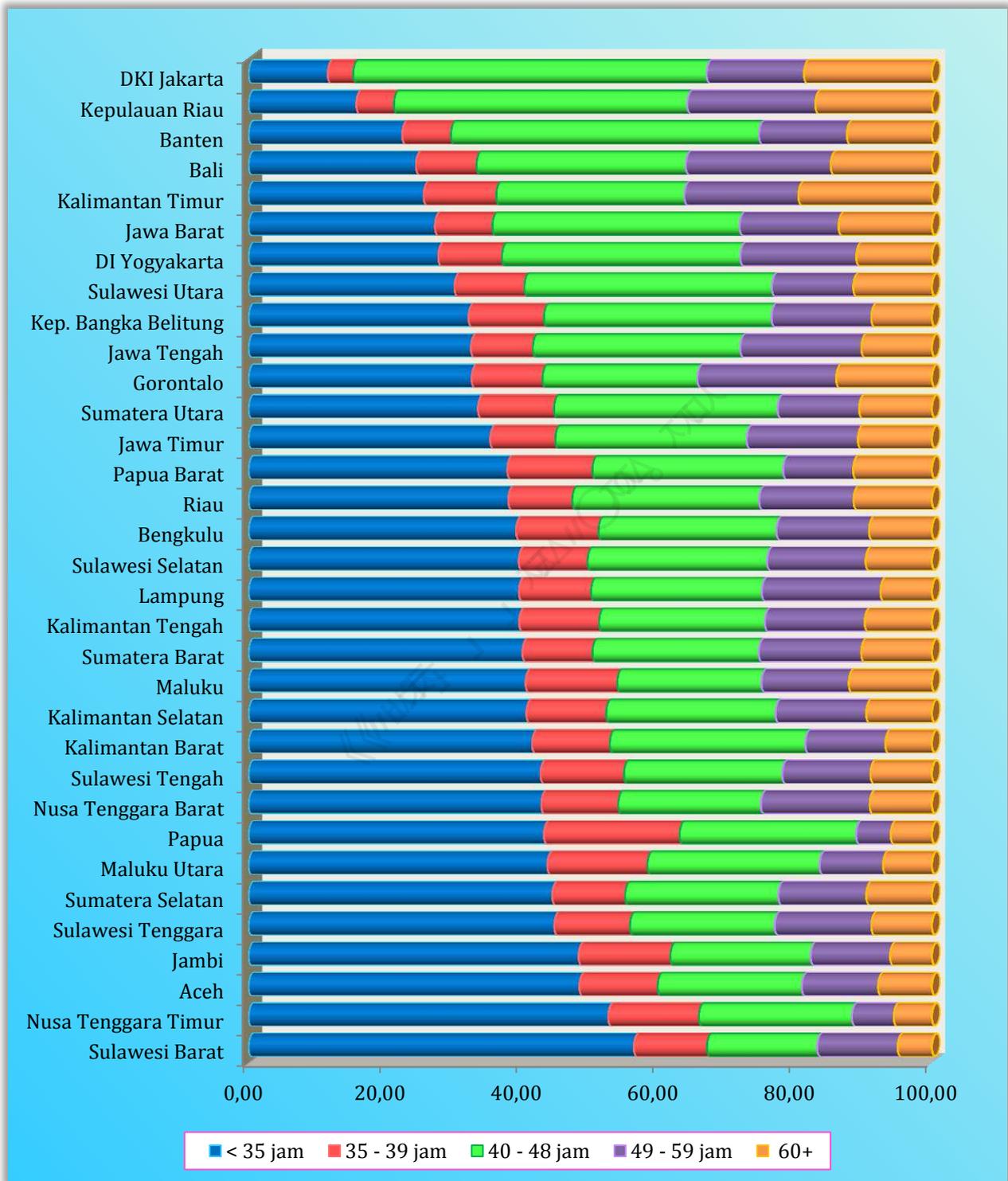
Jumlah Jam Kerja	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,30	1,60	2,17
1–14 jam	4,19	4,08	3,73
15–24 jam	7,27	7,13	7,04
25–34 jam	9,40	9,42	8,67
35–39 jam	8,47	8,31	8,06
40–48 jam	37,68	37,90	39,23
49–59 jam	16,14	16,56	15,98
60 jam ke atas	14,56	15,01	15,12
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,09	1,63	2,64
1–14 jam	8,02	7,58	7,81
15–24 jam	15,84	15,10	16,62
25–34 jam	17,30	17,59	17,87
35–39 jam	11,62	11,55	11,16
40–48 jam	23,46	24,13	22,77
49–59 jam	13,79	14,66	13,64
60 jam ke atas	7,88	7,76	7,49

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Berdasarkan Sakernas Agustus 2014 seperti yang terlihat pada Grafik 9 dan Lampiran 11, menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (56,41 persen), Nusa Tenggara Timur (52,66 persen),

dan Aceh (48,43 persen). Sedangkan sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (11,61 persen), Kepulauan Riau (15,79 persen), dan Banten (22,51 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2014



4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 pada Tabel 10 dan Tabel 11, menunjukkan bahwa dari 114,63 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,24 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (61,03 juta orang).

Berdasarkan hasil Sakernas pada periode Februari 2014, Mei 2014, dan Agustus 2014 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai

dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2014 sebesar 53,59 persen, turun menjadi 53,47 persen pada Mei 2014, dan kembali turun pada Agustus 2014 menjadi 53,24 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2014 mencapai 46,41 persen, naik menjadi 46,53 persen pada Mei 2014, dan naik pada Agustus 2014 hingga mencapai 46,76 persen (Tabel 11).

Pada Agustus 2014, berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yaitu mencapai 65,69 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Februari dan Mei 2014 masing-masing mencapai 64,94 persen dan 65,23 persen.

Sedangkan pada kelompok perempuan, dari total 43,16 juta orang yang bekerja terdapat sebanyak 24,77 juta orang (57,39 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 18,39 juta orang (42,61 persen) bekerja pada sektor formal (Grafik 10).

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal (juta), 2014

Kategori Sektor	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	118,17	118,86	114,63
Laki-laki	72,54	72,85	71,46
Perempuan	45,63	46,01	43,16
Perkotaan	57,47	57,87	55,64
Perdesaan	60,70	60,99	58,98
Formal	54,84	55,31	53,60
Laki-laki	35,61	36,08	35,21
Perempuan	19,23	19,23	18,39
Perkotaan	36,47	36,69	36,00
Perdesaan	18,37	18,62	17,59
Informal	63,33	63,55	61,03
Laki-laki	36,93	36,77	36,26
Perempuan	26,40	26,78	24,77
Perkotaan	21,00	21,18	19,64
Perdesaan	42,33	42,37	41,39

Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2014

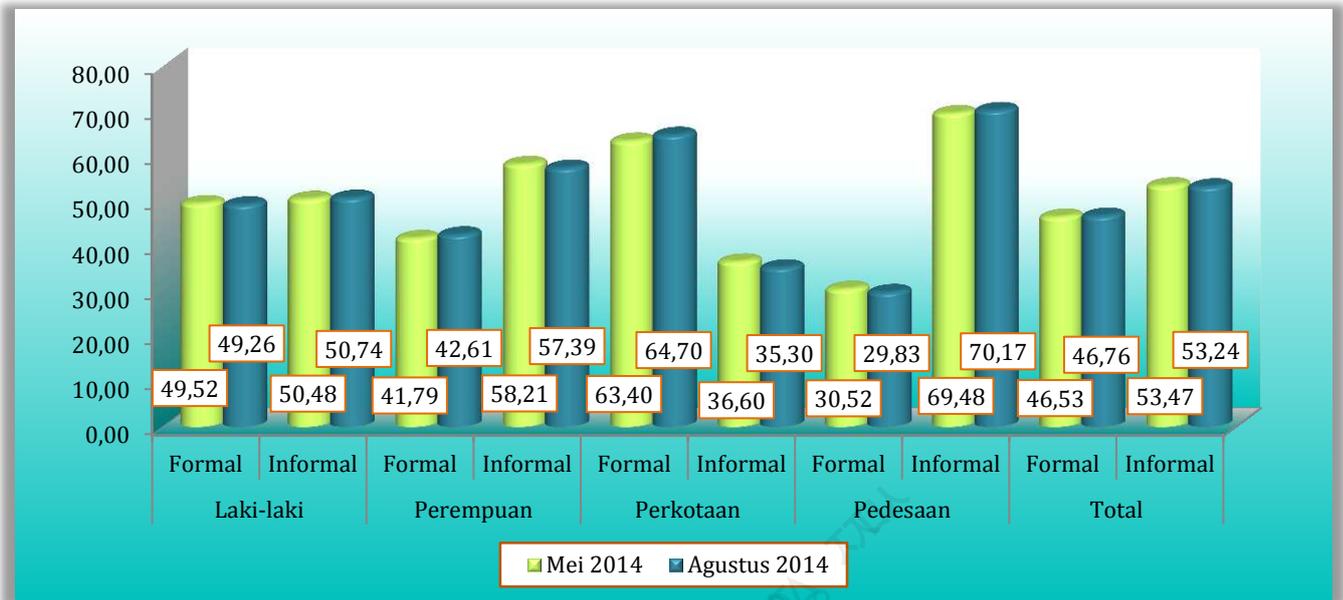
Kategori Sektor	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Formal+Informal	100,00	100,00	100,00
Formal	46,41	46,53	46,76
Informal	53,59	53,47	53,24
Formal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	64,94	65,23	65,69
Perempuan	35,06	34,77	34,31
Perkotaan	66,50	66,34	67,17
Perdesaan	33,50	33,66	32,83
Informal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	58,31	57,86	59,41
Perempuan	41,69	42,14	40,59
Perkotaan	33,16	33,33	32,18
Perdesaan	66,84	66,67	67,82

Berdasarkan Sakernas Agustus 2014 pada Tabel 11 menunjukkan bahwa penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 67,17 persen. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 yang mencapai 66,34 persen (turun 0,83 persen poin), begitu pula bila dibandingkan Februari 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin. Sementara itu, di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, dan mengalami peningkatan bila dibanding keadaan Mei 2014, yaitu dari 66,67 persen pada Mei 2014 turun menjadi 67,82 persen pada Agustus 2014.

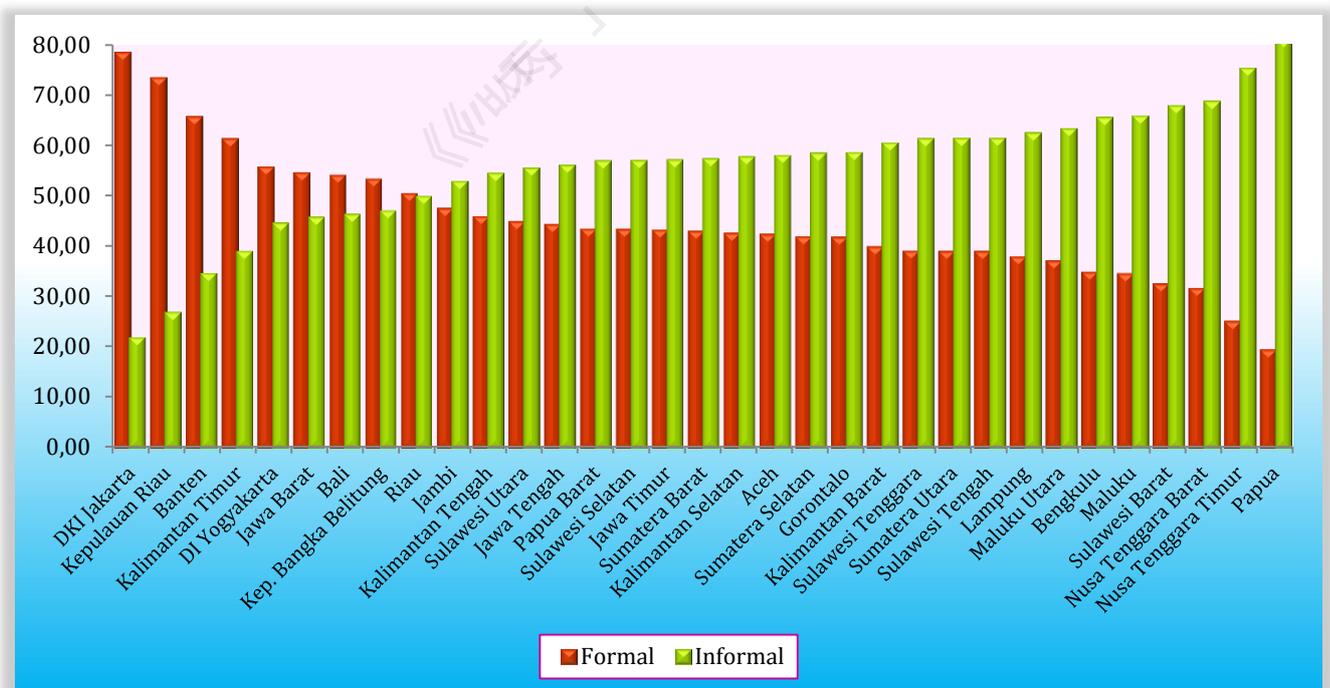
Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang

mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (78,40 persen), Kepulauan Riau (73,35 persen), Banten (65,64 persen), dan Bali (55,61 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (61,21 persen). Sementara itu di sisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (80,73 persen), Nusa Tenggara Timur (75,11 persen), Nusa Tenggara Barat (68,51 persen), Sulawesi Barat (67,64 persen), dan Maluku Utara (65,59 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Mei dan Agustus 2014



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Agustus 2014



5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Pada Tabel 12, TPT pada Agustus 2014 sebesar 5,94 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2014, menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami sedikit fluktuasi bila dibandingkan

dengan keadaan Mei 2014 maupun Februari 2014. Seperti yang terlihat pada Tabel 12, TPT pada Agustus 2014 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,26 persen poin bila dibandingkan Mei 2014 (5,68 persen), tetapi naik sebesar 0,24 persen poin dibandingkan Februari 2014 (5,70 persen).

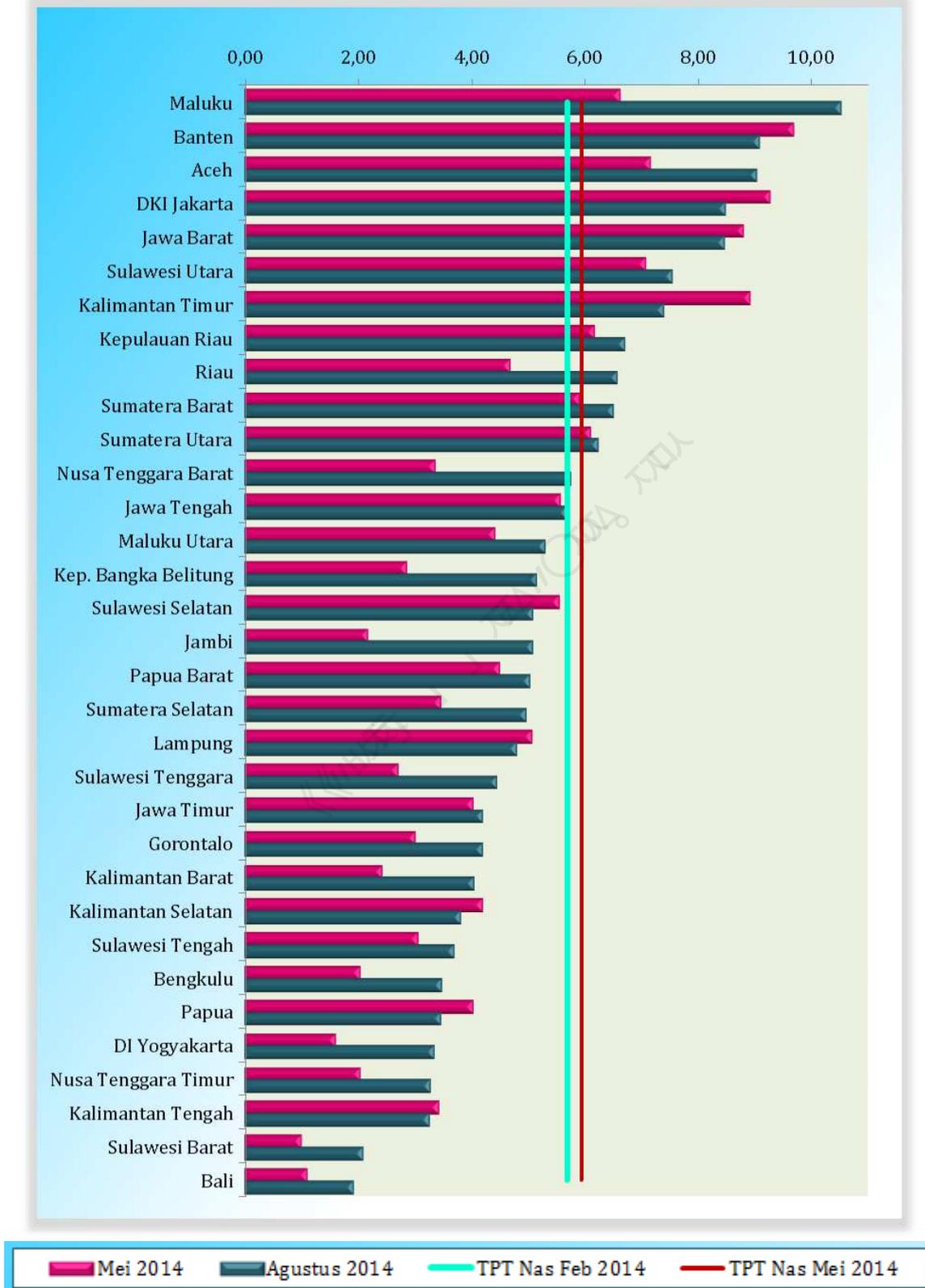
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014

TPT	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,70	5,68	5,94
Laki-laki	5,62	5,54	5,75
Perempuan	5,84	5,90	6,26
Perkotaan	6,97	6,89	7,12
Perdesaan	4,48	4,50	4,81

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT pada periode Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Mei 2014 terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki naik sebesar 0,21 persen poin, sedangkan pada perempuan meningkat sebesar 0,36 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, kenaikan TPT terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,23

persen poin dan 0,31 persen poin. Sementara itu, seiring kenaikan TPT secara nasional pada Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, kenaikan terjadi pada laki-laki dan perempuan, masing-masing sebesar 0,13 dan 0,42 persen poin, sedangkan berdasarkan wilayah tempat tinggal terjadi kenaikan pada wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 0,15 dan 0,33 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Mei dan Agustus 2014



Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Maluku (10,51 persen), Provinsi Banten (9,07 persen), dan Provinsi Aceh (9,02 persen). Sementara hasil Sakernas Mei 2014, TPT tertinggi berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten (9,67 persen), Provinsi DKI Jakarta (9,26 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (8,91 persen). Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Agustus 2014 diduduki oleh Provinsi Bali dengan TPT sebesar

1,90 persen, kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT 2,08 persen, dan posisi ketiga diduduki Provinsi Kalimantan Tengah dengan TPT sebesar 3,24 persen. Sementara itu, tiga provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Mei 2014 diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (0,98 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Bali (1,09 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi DI Yogyakarta (1,59 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 12 dan Lampiran 13.

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 22,20 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 22 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 3,48 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Mei dan naik sebesar 5,15 persen poin apabila dibandingkan Februari 2014 (Tabel 13). Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada Februari dan Mei 2014, TPT penduduk umur muda pada laki-laki cenderung lebih tinggi

daripada perempuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada laki-laki umur 15–24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada perempuan di umur yang sama. Namun sebaliknya pada tahun Agustus 2014, TPT penduduk umur muda laki-laki lebih rendah daripada perempuan.

Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Agustus 2014 mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan jika dibandingkan dengan keadaan Mei 2014. Peningkatan TPT pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. TPT umur muda perempuan mengalami peningkatan sebesar 4,73 persen poin, sedangkan laki-laki sebesar 2,68 persen poin.

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Agustus 2014, TPT daerah perkotaan mencapai 24,24 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 20,08 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 24 orang

yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 20 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Agustus 2014 sebesar 8,13 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan peningkatan TPT umur muda pada Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Mei 2014, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami peningkatan sebesar 1,83 persen

poin, begitu pula jika dibandingkan dengan Februari 2014 rasio tersebut terlihat naik sebesar 3,00 persen poin. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan seperti ditunjukkan berdasarkan hasil Sakernas Februari dan Mei 2014, sedangkan pada Agustus 2014 rasionya sedikit lebih tinggi pada perempuan.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2014

Indikator	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Umur Muda (%)	17,05	18,72	22,20
Laki-laki	17,40	19,04	21,72
Perempuan	16,49	18,21	22,94
Perkotaan	19,18	20,65	24,24
Perdesaan	14,85	16,75	20,08
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	5,13	6,30	8,13
Laki-laki	5,54	7,03	8,10
Perempuan	4,56	5,37	8,16
Perkotaan	4,45	5,22	6,77
Perdesaan	6,23	8,29	10,47
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)	51,76	56,63	61,67
Laki-laki	53,78	59,53	60,94
Perempuan	48,68	52,33	62,78
Perkotaan	49,20	52,63	58,30
Perdesaan	55,64	62,59	66,50
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)	8,49	9,27	10,28
Laki-laki	10,52	11,48	12,06
Perempuan	6,40	7,00	8,45
Perkotaan	9,38	9,95	11,05
Perdesaan	7,53	8,53	9,45

Sementara apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan baik pada Februari, Mei 2014, maupun Agustus 2014. *Share* penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 cukup tinggi yaitu 61,67 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2014, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 62 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Seperti yang terlihat pada Tabel 13, angka ini mengalami peningkatan sebesar 5,04 persen poin bila

dibandingkan dengan Mei 2014 (56,63 persen), dan naik sebesar 9,91 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (51,76 persen).

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2014 sebesar 10,28 persen, hal ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2014 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 10 orang diantaranya merupakan penganggur yang berumur 15 sampai 24 tahun. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka Februari 2014 (8,49 persen) maupun angka Mei 2014 (9,27 persen).

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 10,17 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,42 persen (Tabel 14).

Seiring dengan peningkatan TPT nasional periode Agustus 2014 dibandingkan dengan Mei 2014, peningkatan TPT menurut tingkat pendidikan juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi dengan peningkatan masing-masing sebesar 1,96 persen poin dan 0,87 persen poin. Sementara penurunan TPT terjadi pada kategori tidak pernah sekolah dan sekolah dasar dengan penurunan masing-masing sebesar 1,03 persen poin dan 0,53 persen poin bila dibandingkan dengan periode yang sama.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT pada tingkat pendidikan sekolah menengah periode Agustus 2014 dibandingkan dengan Mei 2014 tampak lebih tinggi terjadi pada perempuan yang naik sebesar 3,02 persen poin, sedangkan pada laki-laki naik sebesar 1,49 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa pada tingkat pendidikan dan periode yang sama, terjadi peningkatan baik di daerah perdesaan maupun perkotaan dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,62 persen poin dan 1,67 persen poin.

Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,70	5,68	5,94
Tidak Pernah Sekolah	2,53	2,45	1,42
Laki-laki	3,07	4,22	1,74
Perempuan	2,13	1,19	1,19
Perkotaan	5,66	3,24	3,06
Perdesaan	1,65	2,24	0,97
Sekolah Dasar	4,91	4,94	4,41
Laki-laki	4,87	4,78	4,45
Perempuan	4,98	5,21	4,33
Perkotaan	6,63	6,65	5,50
Perdesaan	3,82	3,86	3,74
Sekolah Menengah	8,42	8,21	10,17
Laki-laki	7,82	7,50	8,99
Perempuan	9,66	9,63	12,65
Perkotaan	8,40	8,17	9,84
Perdesaan	8,45	8,27	10,89
Sekolah Tinggi	4,72	4,91	5,78
Laki-laki	4,41	4,81	5,26
Perempuan	5,07	5,02	6,38
Perkotaan	4,81	5,06	5,84
Perdesaan	4,45	4,45	5,59

Secara keseluruhan pada periode Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Mei 2014, peningkatan TPT terbesar terdapat pada mereka yang tingkat pendidikannya sekolah menengah yang berjenis kelamin perempuan dengan peningkatan sebesar 3,02 persen poin. Pada Mei 2014, TPT pada kelompok ini sebesar 9,63 persen, sedangkan pada Agustus 2014 naik menjadi 12,65 persen.

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan

seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas pada Februari dan Mei 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Sedangkan pada Agustus 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah menengah.

Pada Agustus 2014, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah menengah mencapai 45,48 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 8,12 persen poin jika dibandingkan Mei 2014 (37,36 persen), dan naik sebesar 7,13 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (38,35 persen).

Selama periode Mei–Agustus 2014, peningkatan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi dengan peningkatan masing-masing sebesar 8,12 persen poin dan 0,95 persen poin. Peningkatan persentase penganggur pada tingkat sekolah menengah terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. Begitu pula peningkatan persentase pada penganggur berpendidikan sekolah tinggi terjadi baik menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Mengamati lebih lanjut Tabel 15, baik pada keadaan Februari, Mei, maupun Agustus 2014 persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Agustus 2014, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 12,31

persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 7,65 persen.

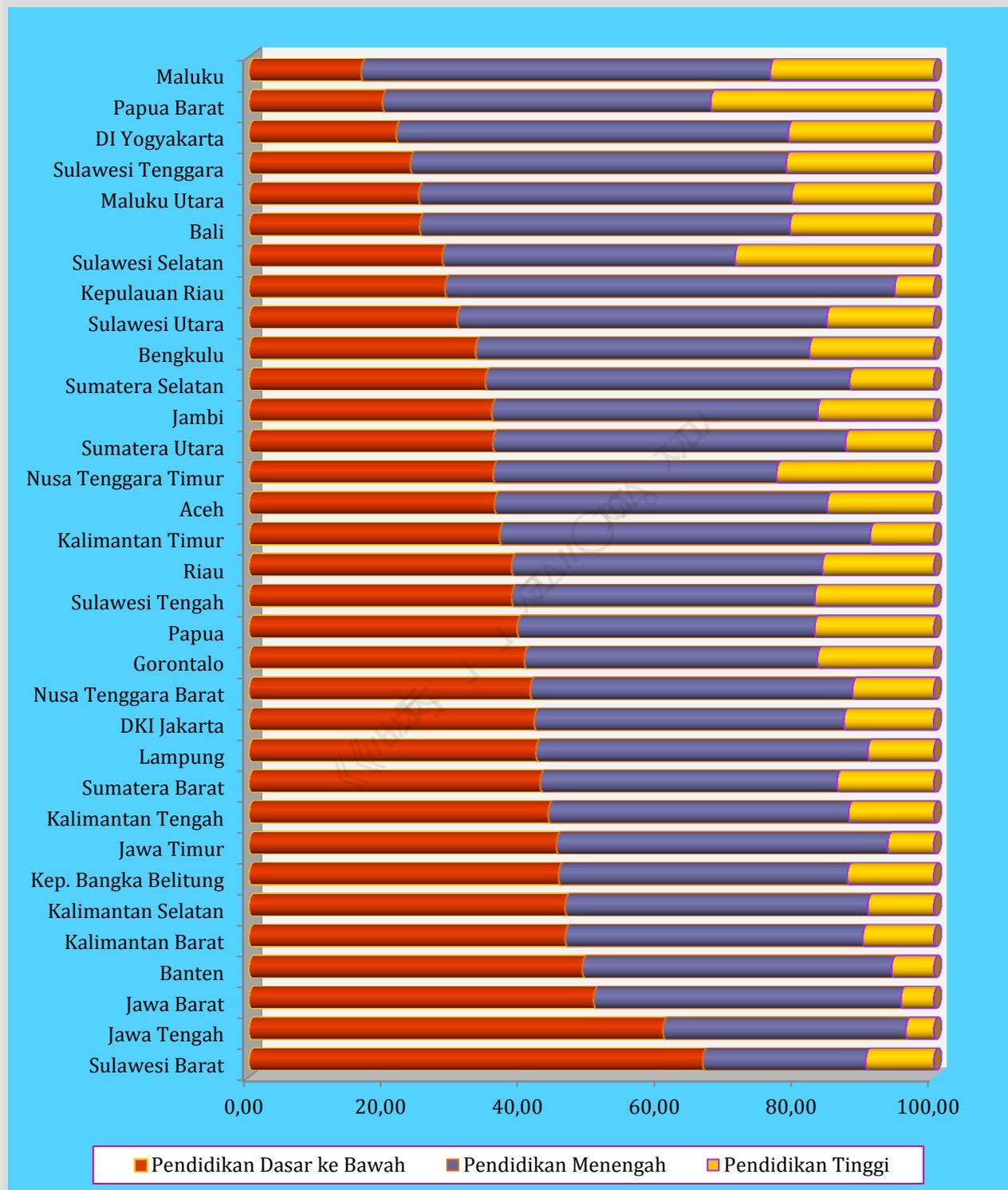
Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2014, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 15, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,34 persen dan 56,13 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 0,82 persen dan 35,48 persen.

Grafik 13 dan Lampiran 15 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada Agustus 2014, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (66,26 persen), disusul oleh Provinsi Jawa Tengah (60,47 persen), dan Provinsi Jawa Barat (50,35 persen) berada pada urutan ketiga. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Papua Barat (32,59 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (29,02 persen) dan Provinsi Maluku (23,88 persen).

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,88	1,83	1,03
Laki-laki	1,59	2,21	0,90
Perempuan	2,31	1,29	1,24
Perkotaan	1,53	0,85	0,82
Perdesaan	2,40	3,30	1,34
Sekolah Dasar	51,47	52,25	43,98
Laki-laki	51,88	52,02	46,24
Perempuan	50,84	52,58	40,55
Perkotaan	44,75	45,68	35,48
Perdesaan	61,64	62,03	56,13
Sekolah Menengah	38,35	37,36	45,48
Laki-laki	39,74	38,40	45,21
Perempuan	36,23	35,82	45,90
Perkotaan	43,14	42,32	51,33
Perdesaan	31,09	29,97	37,13
Sekolah Tinggi	8,30	8,56	9,51
Laki-laki	6,79	7,37	7,65
Perempuan	10,62	10,31	12,31
Perkotaan	10,58	11,15	12,37
Perdesaan	4,87	4,70	5,40

Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Agustus 2014



5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Agustus 2014, mencapai 9,68 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 6,06 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan

sisanya sebanyak 3,62 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2014, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,69 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 2,99 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2014

Setengah Penganggur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	10,57	9,65	9,68
Laki-laki	6,35	5,71	6,06
Perempuan	4,22	3,94	3,62
Perkotaan	3,51	3,18	2,99
Perdesaan	7,06	6,47	6,69

Pada periode Sakernas Mei 2014 dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukkan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur sebanyak 30 ribu orang. Peningkatan angka secara nasional ini diikuti peningkatan jumlah setengah penganggur pada jenis kelamin laki-laki yang naik sebanyak 350 ribu orang. Peningkatan jumlah setengah penganggur juga terjadi baik di wilayah perdesaan yang naik sejumlah 220 ribu orang.

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Mei 2014, tetapi mengalami penurunan jika dibanding Februari 2014 seperti yang terlihat pada Tabel 17 berikut ini.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2014 sebesar 7,94 persen atau naik 0,32 persen poin bila dibanding Mei 2014 (7,66 persen), tetapi turun 0,49 persen poin bila dibanding Februari 2014 (8,43 persen). Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa baik pada Februari, Mei, maupun Agustus 2014, dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2014

Indikator	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	8,43	7,66	7,94
Laki-laki	8,27	7,40	7,99
Perempuan	8,70	8,06	7,87
Perkotaan	5,68	5,11	4,99
Perdesaan	11,11	10,13	10,80
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	8,94	8,12	8,45
Laki-laki	8,76	7,83	8,47
Perempuan	9,23	8,57	8,40
Perkotaan	6,10	5,49	5,37
Perdesaan	11,63	10,61	11,34

Bila Februari 2014 menjadi acuan maka persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terlihat berfluktuatif (turun pada bulan Mei 2014 tetapi meningkat pada Agustus 2014). Pada Februari 2014, dari total penduduk bekerja sekitar 8,94 persen diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Mei 2014 menurun menjadi sebesar 8,12 persen. Akan tetapi pada Agustus 2014 kembali naik menjadi sebesar 8,45 persen setengah penganggur dari total penduduk bekerja.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin selama Sakernas periode Mei 2014–Agustus

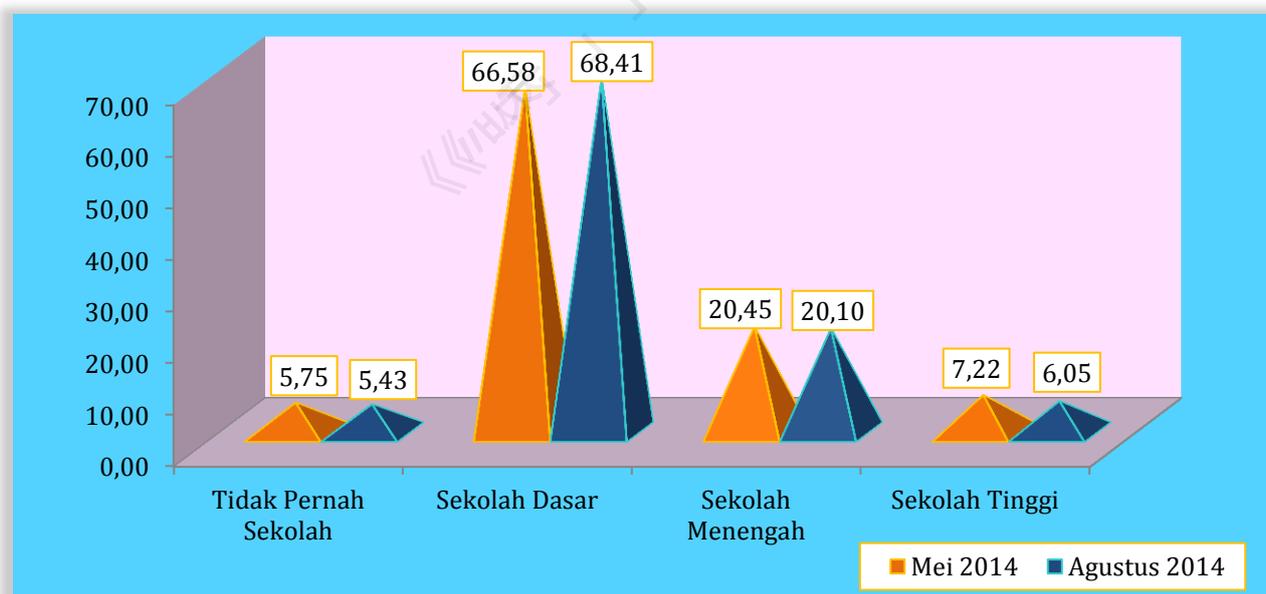
2014, peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja hanya terdapat pada kelompok laki-laki. Pada Mei 2014, dari seluruh penduduk laki-laki yang bekerja, terdapat sekitar 7,83 persen yang termasuk setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2014, naik menjadi sekitar 8,47 persen.

Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Mei 2014–Agustus 2014 peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja hanya terjadi di daerah perdesaan. Pada Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Mei 2014, terjadi peningkatan sebesar 0,73 persen poin di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 0,12 persen poin.

Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2014 (Grafik 14), persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 68,41 persen. Dengan kata lain dari 100 orang

setengah penganggur 68 orang diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Jika dibandingkan dengan kondisi Mei 2014 terjadi peningkatan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar yaitu sebesar 1,83 persen poin. Peningkatan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan peningkatan persentase setengah penganggur baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 3,42 persen poin dan 0,42 persen poin. Berdasarkan klasifikasi wilayah kota-desa peningkatan persentase tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan peningkatan masing-masing sebesar 1,60 persen poin dan 1,49 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Mei dan Agustus 2014



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	5,52	5,75	5,43
Laki-laki	4,03	4,33	3,75
Perempuan	7,76	7,80	8,25
Perkotaan	2,93	3,60	3,21
Perdesaan	6,80	6,80	6,43
Sekolah Dasar	66,79	66,58	68,41
Laki-laki	69,29	70,02	70,44
Perempuan	63,01	61,60	65,02
Perkotaan	56,89	56,48	58,08
Perdesaan	71,71	71,54	73,03
Sekolah Menengah	20,58	20,45	20,11
Laki-laki	22,02	21,13	21,60
Perempuan	18,42	19,48	17,60
Perkotaan	28,33	28,02	27,90
Perdesaan	16,74	16,74	16,62
Sekolah Tinggi	7,11	7,22	6,05
Laki-laki	4,66	4,52	4,21
Perempuan	10,81	11,12	9,13
Perkotaan	11,85	11,90	10,81
Perdesaan	4,75	4,92	3,92

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 33,40 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 33,40 persen.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2014 meningkat baik dibandingkan dengan keadaan Mei 2014 maupun Agustus 2014. Jika dibandingkan dengan Mei 2014, tingkat

ketidakaktifan pada Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,73 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 naik sebesar 2,57 persen poin. Sejalan dengan peningkatan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Mei 2014–Agustus 2014), jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 5,37 juta orang dari 55,75 juta orang pada Mei 2014 menjadi 61,12 juta orang pada Agustus 2014 (Lampiran 17).

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2014

Tingkat ketidakaktifan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	30,83	30,67	33,40
Laki-laki	14,96	14,95	16,95
Perempuan	46,63	46,32	49,78
Perkotaan	32,82	32,65	35,53
Perdesaan	28,77	28,63	31,20

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 17 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 50 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Mei 2014, terjadi peningkatan

tingkat ketidakaktifan pada laki-laki sebesar 2,00 persen poin, sedangkan pada perempuan naik sebesar 3,46 persen poin.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2014 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 35,53 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 31,20 persen. Tingkat ketidakaktifan di

daerah perkotaan pada Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,88 persen poin bila dibandingkan keadaan Mei 2014. Begitupun di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 2,53 persen poin, yaitu dari 28,63 persen pada Mei 2014 menjadi 31,20 persen pada Agustus 2014.

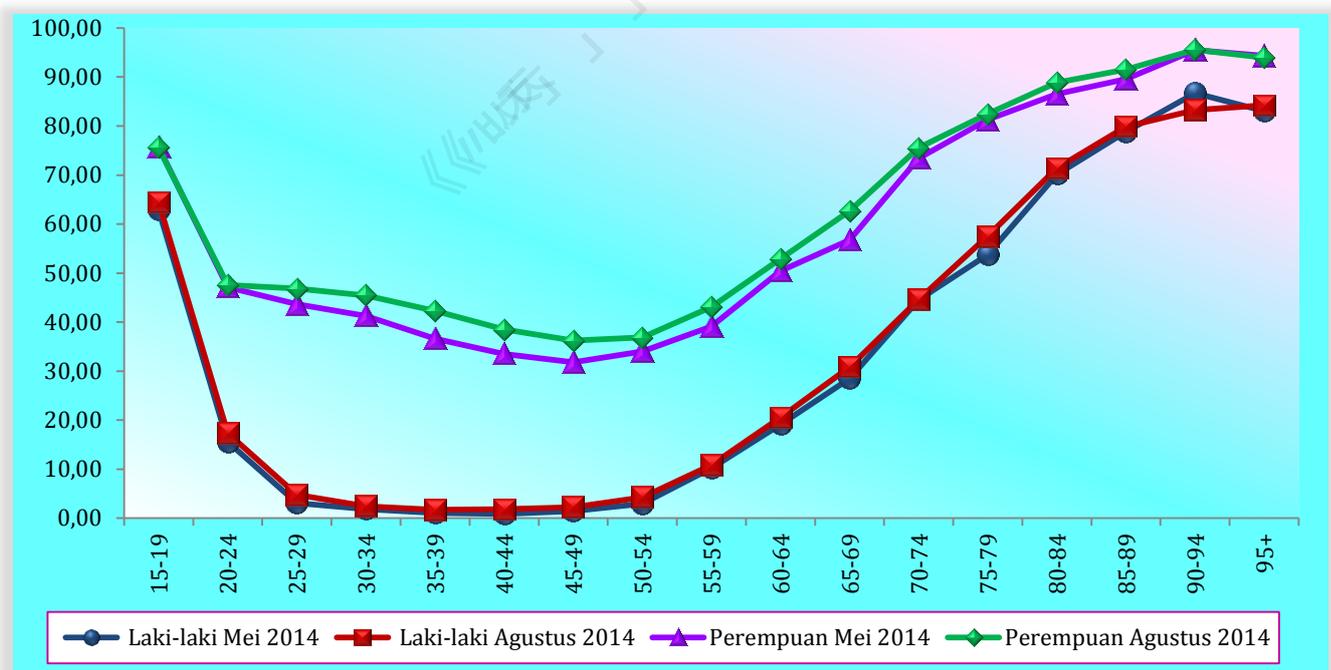
Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 15 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf “J”).

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2014, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 64,48 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,81 persen pada kelompok umur (40–44) tahun. Dan kembali meningkat pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 75,58 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (50–54) tahun yaitu sebesar 36,22 persen, kembali meningkat pada kelompok umur (55–59) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Mei dan Agustus 2014



6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Mei 2014. Angkatan kerja pada Agustus 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 59,33

persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,58 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,77 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,32 persen (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2014, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 12,09 persen dibandingkan 8,37 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada Mei 2014 maupun Agustus 2014, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (sekitar 50 persen), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah.

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah,

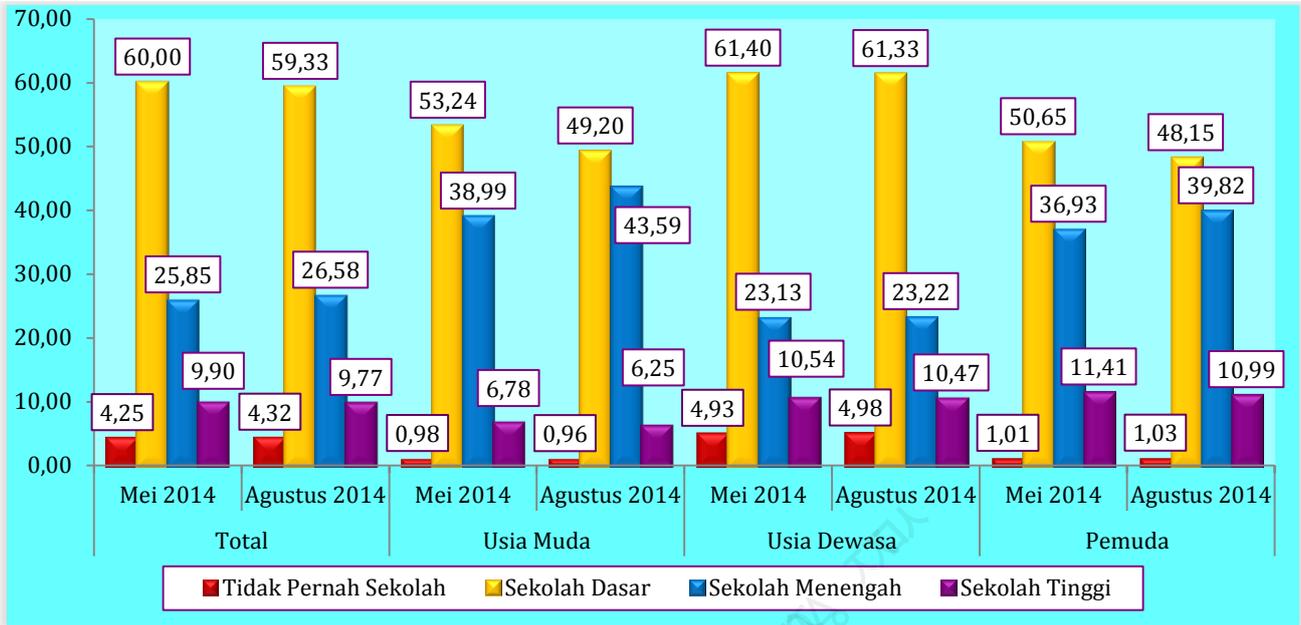
padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Sementara itu, seperti tampak pada Grafik 17, pada Agustus 2014, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

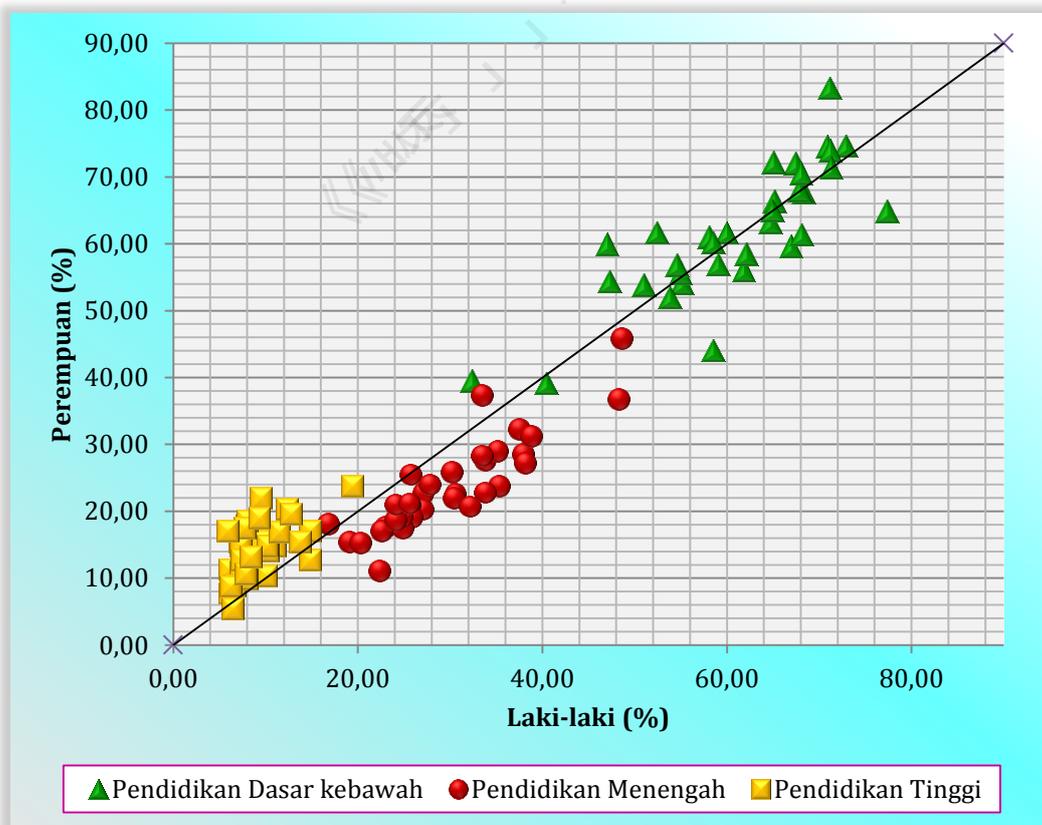
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,23	4,25	4,32
Laki-laki	2,92	2,89	2,97
Perempuan	6,31	6,39	6,53
Perkotaan	1,88	1,81	1,91
Perdesaan	6,51	6,62	6,65
Sekolah Dasar	59,76	60,00	59,33
Laki-laki	59,87	60,29	59,73
Perempuan	59,59	59,55	58,67
Perkotaan	47,04	47,33	45,92
Perdesaan	72,13	72,34	72,29
Sekolah Menengah	25,98	25,85	26,58
Laki-laki	28,56	28,34	28,93
Perempuan	21,88	21,94	22,71
Perkotaan	35,77	35,68	37,10
Perdesaan	16,46	16,29	16,41
Sekolah Tinggi	10,03	9,90	9,77
Laki-laki	8,65	8,48	8,37
Perempuan	12,22	12,12	12,09
Perkotaan	15,31	15,18	15,07
Perdesaan	4,90	4,75	4,65

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Mei dan Agustus 2014



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2014



Lampiran

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 643	1 685	3 327	1 651	1 693	3 344	1 663	1 704	3 367
Sumatera Utara	4 566	4 698	9 264	4 582	4 713	9 295	4 612	4 739	9 351
Sumatera Barat	1 740	1 806	3 546	1 745	1 812	3 557	1 757	1 820	3 577
Riau	2 155	2 033	4 188	2 168	2 046	4 214	2 190	2 067	4 257
Jambi	1 208	1 153	2 361	1 213	1 158	2 371	1 225	1 170	2 395
Sumatera Selatan	2 831	2 758	5 589	2 841	2 768	5 609	2 859	2 784	5 644
Bengkulu	663	639	1 302	665	642	1 307	671	647	1 318
Lampung	2 932	2 780	5 711	2 941	2 788	5 729	2 955	2 804	5 759
Kep. Bangka Belitung	500	458	959	503	461	964	508	465	973
Kepulauan Riau	672	643	1 315	677	648	1 325	680	652	1 332
DKI Jakarta	3 799	3 778	7 577	3 809	3 789	7 597	3 804	3 798	7 601
Jawa Barat	16 715	16 358	33 073	16 779	16 419	33 198	16 906	16 559	33 465
Jawa Tengah	12 247	12 731	24 978	12 270	12 756	25 026	12 348	12 834	25 182
DI Yogyakarta	1 383	1 446	2 830	1 387	1 451	2 838	1 393	1 455	2 848
Jawa Timur	14 329	15 048	29 377	14 351	15 072	29 423	14 435	15 143	29 579
Banten	4 198	4 045	8 243	4 221	4 067	8 288	4 258	4 103	8 362
Bali	1 533	1 534	3 066	1 537	1 538	3 076	1 546	1 546	3 093
Nusa Tenggara Barat	1 563	1 740	3 302	1 568	1 745	3 313	1 580	1 755	3 335
Nusa Tenggara Timur	1 571	1 648	3 219	1 578	1 655	3 233	1 593	1 668	3 261
Kalimantan Barat	1 670	1 611	3 281	1 677	1 617	3 294	1 689	1 629	3 318
Kalimantan Tengah	899	812	1 711	905	816	1 721	916	825	1 740
Kalimantan Selatan	1 393	1 373	2 766	1 399	1 379	2 778	1 409	1 386	2 795
Kalimantan Timur	1 474	1 305	2 779	1 483	1 313	2 796	1 499	1 326	2 825
Sulawesi Utara	892	861	1 753	895	863	1 758	900	868	1 768
Sulawesi Tengah	1 015	974	1 989	1 019	978	1 997	1 026	985	2 011
Sulawesi Selatan	2 836	3 094	5 930	2 844	3 102	5 946	2 867	3 122	5 990
Sulawesi Tenggara	794	805	1 599	798	810	1 608	807	817	1 623
Gorontalo	390	396	786	392	397	789	395	400	796
Sulawesi Barat	419	425	844	421	427	848	425	431	856
Maluku	544	545	1 089	547	548	1 094	552	552	1 104
Maluku Utara	379	364	743	381	366	747	385	369	754
Papua Barat	306	268	574	308	269	577	312	272	583
Papua	1 118	979	2 097	1 124	984	2 108	1 136	994	2 129
Indonesia	90 378	90 792	181 170	90 680	91 089	181 769	91 302	91 691	182 992

Lampiran 2 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	181,17	181,77	182,99
Laki-laki	90,38	90,68	91,30
Perempuan	90,79	91,09	91,69
Perkotaan	91,96	92,30	92,93
Perdesaan	89,21	89,47	90,07
(15–64)	168,57	169,20	169,70
Laki-laki	84,75	85,05	85,32
Perempuan	83,81	84,15	84,38
Perkotaan	86,34	86,68	86,84
Perdesaan	82,23	82,53	82,86
(15–24)	43,58	43,73	43,47
Laki-laki	22,08	22,15	22,05
Perempuan	21,50	21,58	21,42
Perkotaan	22,57	22,65	22,50
Perdesaan	21,01	21,08	20,98
(25–54)	107,34	107,69	108,15
Laki-laki	53,73	53,91	54,12
Perempuan	53,60	53,78	54,03
Perkotaan	55,13	55,33	55,61
Perdesaan	52,20	52,36	52,54
(25–34)	41,39	41,53	41,24
Laki-laki	20,65	20,72	20,59
Perempuan	20,74	20,81	20,64
Perkotaan	21,76	21,84	21,69
Perdesaan	19,63	19,69	19,54
(35–54)	65,95	66,16	66,91
Laki-laki	33,09	33,20	33,53
Perempuan	32,86	32,97	33,39
Perkotaan	33,37	33,49	33,91
Perdesaan	32,57	32,67	33,00
(55–64)	17,66	17,78	18,07
Laki-laki	8,95	8,99	9,14
Perempuan	8,71	8,80	8,93
Perkotaan	8,64	8,69	8,73
Perdesaan	9,01	9,09	9,34
65 Tahun ke atas	12,60	12,57	13,29
Laki-laki	5,62	5,63	5,98
Perempuan	6,98	6,94	7,31
Perkotaan	5,62	5,62	6,09
Perdesaan	6,98	6,95	7,21

Lampiran 3 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 363	810	2 173	1 370	815	2 185	1 344	779	2 123
Sumatera Utara	3 895	2 871	6 766	3 907	2 884	6 791	3 838	2 434	6 272
Sumatera Barat	1 487	1 015	2 503	1 476	1 051	2 526	1 410	922	2 332
Riau	1 844	957	2 801	1 850	964	2 815	1 822	873	2 695
Jambi	1 020	551	1 570	1 012	546	1 558	1 027	544	1 571
Sumatera Selatan	2 440	1 582	4 022	2 420	1 608	4 028	2 412	1 473	3 886
Bengkulu	569	399	968	571	386	957	554	346	900
Lampung	2 571	1 458	4 029	2 565	1 505	4 070	2 523	1 335	3 858
Kep Bangka Belitung	433	208	641	428	209	637	433	204	637
Kepulauan Riau	593	299	892	603	303	907	586	292	878
DKI Jakarta	3 230	1 959	5 189	3 282	2 085	5 367	3 193	1 871	5 063
Jawa Barat	14 182	7 105	21 287	14 305	7 253	21 558	14 001	7 005	21 006
Jawa Tengah	10 399	7 318	17 716	10 463	7 476	17 939	10 240	7 307	17 547
DI Yogyakarta	1 075	958	2 033	1 097	910	2 008	1 127	896	2 023
Jawa Timur	12 242	8 475	20 718	12 206	8 428	20 634	12 098	8 052	20 150
Banten	3 540	1 939	5 479	3 600	1 976	5 577	3 547	1 791	5 338
Bali	1 299	1 111	2 410	1 297	1 073	2 370	1 277	1 040	2 317
Nusa Tenggara Barat	1 340	995	2 335	1 308	1 003	2 311	1 277	944	2 222
Nusa Tenggara Timur	1 302	1 081	2 383	1 285	1 052	2 337	1 274	973	2 247
Kalimantan Barat	1 422	947	2 369	1 421	940	2 362	1 414	907	2 320
Kalimantan Tengah	790	458	1 248	789	439	1 228	781	412	1 193
Kalimantan Selatan	1 233	785	2 018	1 199	789	1 988	1 203	738	1 941
Kalimantan Timur	1 279	645	1 924	1 316	607	1 923	1 251	561	1 811
Sulawesi Utara	768	392	1 159	751	391	1 142	718	343	1 061
Sulawesi Tengah	874	554	1 428	882	547	1 428	869	474	1 343
Sulawesi Selatan	2 330	1 348	3 678	2 354	1 411	3 765	2 301	1 415	3 716
Sulawesi Tenggara	673	463	1 136	669	465	1 134	663	423	1 086
Gorontalo	323	197	521	325	194	519	321	179	500
Sulawesi Barat	356	245	601	355	259	614	362	247	608
Maluku	439	289	728	443	286	729	420	252	672
Maluku Utara	311	182	493	311	188	499	310	171	482
Papua Barat	258	150	408	266	151	417	254	144	398
Papua	977	712	1 689	993	705	1 698	975	701	1 675
Indonesia	76 859	48 458	125 317	77 121	48 899	126 020	75 826	46 047	121 873

Lampiran 4 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2014

Kelompok Umur	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	125,32	126,02	121,87
Laki-laki	76,86	77,12	75,83
Perempuan	48,46	48,90	46,05
Perkotaan	61,78	62,16	59,91
Perdesaan	63,54	63,86	61,97
(15–64)	120,15	120,91	116,78
Laki-laki	73,67	73,99	72,60
Perempuan	46,48	46,91	44,18
Perkotaan	59,94	60,30	58,05
Perdesaan	60,21	60,61	58,72
(15–24)	21,70	21,65	20,13
Laki-laki	13,35	13,35	12,24
Perempuan	8,35	8,29	7,89
Perkotaan	11,04	10,92	10,25
Perdesaan	10,66	10,73	9,88
(25–54)	85,85	86,60	84,19
Laki-laki	52,59	52,91	52,60
Perempuan	33,27	33,69	31,60
Perkotaan	43,36	43,79	42,43
Perdesaan	42,49	42,82	41,76
(25–34)	31,99	32,18	31,00
Laki-laki	20,09	20,21	19,87
Perempuan	11,90	11,97	11,13
Perkotaan	16,81	16,90	16,31
Perdesaan	15,18	15,28	14,69
(35–54)	53,86	54,42	53,19
Laki-laki	32,49	32,71	32,72
Perempuan	21,37	21,72	20,46
Perkotaan	26,55	26,88	26,12
Perdesaan	27,31	27,54	27,07
(55–64)	12,60	12,66	12,46
Laki-laki	7,74	7,73	7,76
Perempuan	4,86	4,93	4,70
Perkotaan	5,54	5,60	5,37
Perdesaan	7,06	7,06	7,09
65 Tahun ke atas	5,17	5,11	5,09
Laki-laki	3,19	3,13	3,23
Perempuan	1,98	1,99	1,87
Perkotaan	1,83	1,86	1,85
Perdesaan	3,33	3,25	3,24

Lampiran 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	83,00	48,08	65,32	83,01	48,13	65,35	80,80	45,74	63,06
Sumatera Utara	85,31	61,11	73,04	85,26	61,20	73,06	83,23	51,35	67,07
Sumatera Barat	85,49	56,22	70,58	84,56	57,99	71,02	80,25	50,65	65,19
Riau	85,57	47,08	66,88	85,33	47,14	66,79	83,23	42,21	63,31
Jambi	84,40	47,75	66,51	83,37	47,17	65,69	83,85	46,46	65,59
Sumatera Selatan	86,20	57,34	71,96	85,16	58,09	71,80	84,37	52,91	68,85
Bengkulu	85,89	62,44	74,38	85,79	60,23	73,24	82,59	53,46	68,29
Lampung	87,70	52,45	70,55	87,24	53,96	71,04	85,37	47,62	66,99
Kep. Bangka Belitung	86,48	45,40	66,84	85,11	45,37	66,11	85,09	43,97	65,45
Kepulauan Riau	88,20	46,55	67,83	89,14	46,78	68,42	86,18	44,83	65,95
DKI Jakarta	85,04	51,85	68,49	86,17	55,04	70,64	83,94	49,26	66,61
Jawa Barat	84,84	43,44	64,36	85,25	44,18	64,94	82,82	42,30	62,77
Jawa Tengah	84,91	57,48	70,93	85,27	58,60	71,68	82,93	56,93	69,68
DI Yogyakarta	77,70	66,24	71,84	79,10	62,74	70,74	80,93	61,60	71,05
Jawa Timur	85,44	56,32	70,52	85,05	55,92	70,13	83,81	53,17	68,12
Banten	84,33	47,94	66,47	85,30	48,59	67,28	83,30	43,65	63,84
Bali	84,78	72,43	78,61	84,39	69,75	77,07	82,55	67,26	74,91
Nusa Tenggara Barat	85,76	57,19	70,71	83,42	57,47	69,75	80,87	53,81	66,63
Nusa Tenggara Timur	82,88	65,60	74,04	81,45	63,56	72,29	80,00	58,33	68,91
Kalimantan Barat	85,15	58,79	72,21	84,76	58,16	71,70	83,71	55,65	69,93
Kalimantan Tengah	87,82	56,42	72,93	87,20	53,79	71,35	85,30	49,97	68,56
Kalimantan Selatan	88,51	57,16	72,95	85,69	57,22	71,56	85,41	53,25	69,46
Kalimantan Timur	86,77	49,43	69,23	88,71	46,24	68,77	83,42	42,26	64,10
Sulawesi Utara	86,04	45,50	66,14	83,92	45,32	64,98	79,76	39,47	59,99
Sulawesi Tengah	86,08	56,91	71,79	86,51	55,92	71,53	84,66	48,11	66,76
Sulawesi Selatan	82,15	43,56	62,02	82,79	45,48	63,32	80,23	45,33	62,04
Sulawesi Tenggara	84,77	57,54	71,05	83,83	57,41	70,53	82,16	51,76	66,87
Gorontalo	82,82	49,89	66,25	82,93	48,76	65,73	81,25	44,66	62,84
Sulawesi Barat	85,02	57,56	71,18	84,50	60,55	72,42	85,15	57,18	71,06
Maluku	80,72	52,99	66,84	81,00	52,26	66,62	76,19	45,66	60,92
Maluku Utara	82,11	50,09	66,43	81,71	51,32	66,83	80,63	46,42	63,88
Papua Barat	84,19	56,01	71,05	86,27	56,23	72,26	81,47	53,18	68,30
Papua	87,41	72,69	80,54	88,39	71,65	80,58	85,83	70,49	78,67
Indonesia	85,04	53,37	69,17	85,05	53,68	69,33	83,05	50,22	66,60

Lampiran 6 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 274	752	2 027	1 274	755	2 029	1 240	692	1 932
Sumatera Utara	3 703	2 661	6 364	3 702	2 675	6 377	3 631	2 251	5 881
Sumatera Barat	1 401	944	2 344	1 390	987	2 377	1 323	857	2 180
Riau	1 764	897	2 661	1 775	909	2 684	1 720	798	2 518
Jambi	998	533	1 531	990	534	1 524	984	507	1 491
Sumatera Selatan	2 337	1 530	3 868	2 334	1 556	3 889	2 278	1 415	3 693
Bengkulu	560	392	952	558	380	938	538	331	869
Lampung	2 455	1 370	3 824	2 480	1 384	3 864	2 420	1 254	3 673
Kep Bangka Belitung	420	203	624	417	203	619	413	191	604
Kepulauan Riau	570	275	845	573	278	851	553	266	820
DKI Jakarta	2 919	1 760	4 679	3 010	1 860	4 870	2 941	1 694	4 634
Jawa Barat	12 975	6 468	19 444	13 085	6 580	19 665	12 871	6 360	19 231
Jawa Tengah	9 810	6 941	16 751	9 880	7 063	16 942	9 672	6 879	16 551
DI Yogyakarta	1 046	943	1 989	1 074	901	1 976	1 083	873	1 956
Jawa Timur	11 756	8 130	19 885	11 734	8 070	19 804	11 577	7 729	19 307
Banten	3 188	1 750	4 938	3 255	1 782	5 037	3 227	1 627	4 854
Bali	1 277	1 100	2 377	1 280	1 064	2 344	1 249	1 024	2 273
Nusa Tenggara Barat	1 266	945	2 211	1 258	976	2 234	1 195	899	2 094
Nusa Tenggara Timur	1 273	1 063	2 336	1 257	1 033	2 290	1 233	941	2 174
Kalimantan Barat	1 386	923	2 309	1 385	920	2 305	1 356	870	2 227
Kalimantan Tengah	771	443	1 214	761	425	1 186	756	399	1 154
Kalimantan Selatan	1 184	753	1 936	1 151	754	1 905	1 156	712	1 867
Kalimantan Timur	1 176	577	1 753	1 188	564	1 752	1 167	511	1 677
Sulawesi Utara	730	345	1 075	712	350	1 062	675	306	981
Sulawesi Tengah	848	538	1 386	857	528	1 385	842	452	1 293
Sulawesi Selatan	2 215	1 249	3 465	2 242	1 314	3 556	2 202	1 325	3 527
Sulawesi Tenggara	660	452	1 112	652	452	1 103	636	402	1 037
Gorontalo	317	191	508	315	188	503	309	170	479
Sulawesi Barat	352	240	591	354	255	608	358	238	596
Maluku	418	262	680	414	267	681	382	220	602
Maluku Utara	299	167	465	299	178	477	297	159	456
Papua Barat	249	143	393	253	146	399	242	136	378
Papua	943	687	1 630	945	685	1 630	940	678	1 617
Indonesia	72 540	45 630	118 170	72 851	46 013	118 864	71 463	43 165	114 628

Lampiran 7 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	77,58	44,66	60,91	77,14	44,62	60,68	74,52	40,64	57,38
Sumatera Utara	81,09	56,65	68,69	80,79	56,75	68,60	78,73	47,49	62,90
Sumatera Barat	80,50	52,26	66,12	79,65	54,49	66,83	75,29	47,10	60,95
Riau	81,86	44,13	63,55	81,83	44,43	63,68	78,56	38,62	59,16
Jambi	82,65	46,19	64,84	81,58	46,13	64,27	80,32	43,34	62,25
Sumatera Selatan	82,56	55,48	69,20	82,13	56,19	69,33	79,67	50,81	65,43
Bengkulu	84,49	61,43	73,17	83,86	59,22	71,77	80,21	51,10	65,92
Lampung	83,72	49,28	66,96	84,35	49,64	67,46	81,87	44,71	63,78
Kep. Bangka Belitung	84,02	44,34	65,05	82,81	43,94	64,23	81,22	41,17	62,09
Kepulauan Riau	84,78	42,83	64,26	84,63	42,87	64,21	81,36	40,85	61,53
DKI Jakarta	76,85	46,57	61,75	79,03	49,09	64,10	77,31	44,60	60,97
Jawa Barat	77,63	39,54	58,79	77,99	40,07	59,24	76,13	38,41	57,47
Jawa Tengah	80,10	54,52	67,06	80,52	55,37	67,70	78,32	53,60	65,72
DI Yogyakarta	75,62	65,18	70,28	77,42	62,14	69,61	77,79	59,97	68,69
Jawa Timur	82,04	54,03	67,69	81,76	53,54	67,31	80,20	51,04	65,27
Banten	75,94	43,26	59,91	77,11	43,82	60,77	75,78	39,66	58,05
Bali	83,31	71,75	77,53	83,30	69,15	76,22	80,74	66,22	73,48
Nusa Tenggara Barat	81,02	54,33	66,96	80,23	55,91	67,42	75,68	51,20	62,80
Nusa Tenggara Timur	81,03	64,52	72,58	79,63	62,43	70,83	77,42	56,40	66,67
Kalimantan Barat	82,97	57,33	70,38	82,58	56,90	69,97	80,33	53,40	67,10
Kalimantan Tengah	85,67	54,64	70,95	84,17	52,01	68,91	82,53	48,36	66,34
Kalimantan Selatan	84,96	54,84	70,01	82,25	54,67	68,56	82,05	51,35	66,82
Kalimantan Timur	79,80	44,20	63,08	80,11	42,92	62,64	77,82	38,51	59,37
Sulawesi Utara	81,80	40,11	61,33	79,52	40,53	60,38	74,95	35,25	55,47
Sulawesi Tengah	83,55	55,26	69,70	84,06	54,04	69,36	82,01	45,86	64,31
Sulawesi Selatan	78,11	40,38	58,43	78,83	42,38	59,81	76,81	42,42	58,88
Sulawesi Tenggara	83,12	56,16	69,54	81,66	55,78	68,62	78,78	49,21	63,91
Gorontalo	81,32	48,16	64,63	80,32	47,42	63,76	78,09	42,55	60,21
Sulawesi Barat	83,98	56,32	70,04	84,06	59,57	71,71	84,16	55,22	69,58
Maluku	76,84	48,07	62,44	75,76	48,70	62,22	69,17	39,87	54,52
Maluku Utara	78,82	45,85	62,67	78,50	48,66	63,88	77,09	43,20	60,50
Papua Barat	81,36	53,61	68,42	82,12	54,03	69,03	77,63	50,23	64,87
Papua	84,36	70,16	77,73	84,05	69,66	77,33	82,77	68,17	75,96
Indonesia	80,26	50,26	65,23	80,34	50,52	65,39	78,27	47,08	62,64

Lampiran 8 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	32,51	33,33	35,35	3,91	4,76	4,50	37,27	37,52	37,60
Sumatera Utara	30,51	29,62	38,95	3,26	2,77	3,55	36,73	36,81	34,01
Sumatera Barat	30,60	30,90	31,11	5,20	4,33	4,38	40,12	39,31	41,64
Riau	41,84	43,37	40,87	5,20	5,08	4,69	32,61	32,10	33,95
Jambi	35,38	36,37	33,29	4,91	4,32	4,15	37,86	38,43	39,11
Sumatera Selatan	33,59	33,60	34,61	2,34	2,11	2,85	36,37	38,30	37,13
Bengkulu	26,21	25,94	30,91	3,11	3,65	3,30	39,78	40,12	39,61
Lampung	25,18	25,97	26,22	3,54	4,45	3,11	38,29	37,29	39,36
Kep Bangka Belitung	40,94	39,85	43,21	7,44	7,93	5,75	35,46	34,49	31,63
Kepulauan Riau	60,46	62,84	63,87	2,23	3,39	5,25	28,31	26,09	23,62
DKI Jakarta	67,85	68,38	67,77	3,80	4,15	4,72	20,41	19,48	20,70
Jawa Barat	43,86	43,92	42,45	3,30	3,57	3,54	29,20	28,71	31,73
Jawa Tengah	34,25	32,99	31,72	3,69	3,49	3,86	34,29	34,92	36,53
DI Yogyakarta	41,81	41,76	43,22	4,10	3,54	3,90	32,11	32,87	30,51
Jawa Timur	30,74	31,82	30,99	3,54	3,14	3,93	34,20	34,62	35,61
Banten	56,45	56,22	57,26	4,42	3,91	3,18	24,57	24,70	23,53
Bali	38,27	40,56	43,35	3,64	3,74	4,33	33,31	32,13	30,07
Nusa Tenggara Barat	22,10	20,76	23,39	2,59	3,14	2,49	39,46	39,46	40,59
Nusa Tenggara Timur	17,33	18,63	19,59	1,33	1,92	1,50	41,75	41,19	46,92
Kalimantan Barat	30,93	32,26	31,26	3,50	3,41	3,32	37,89	36,59	35,37
Kalimantan Tengah	38,66	37,75	37,13	2,22	2,73	3,51	37,47	38,92	38,61
Kalimantan Selatan	33,55	33,12	34,04	3,02	1,79	2,93	41,66	41,42	39,61
Kalimantan Timur	54,32	54,81	52,14	3,14	3,81	3,79	27,56	28,25	29,95
Sulawesi Utara	35,52	37,79	38,78	4,01	3,35	3,43	36,92	38,49	36,19
Sulawesi Tengah	29,59	26,19	28,98	3,35	4,34	4,29	38,27	38,52	40,20
Sulawesi Selatan	32,61	31,41	32,67	4,37	4,66	3,78	41,23	41,34	39,22
Sulawesi Tenggara	28,11	28,61	28,36	3,86	3,96	3,78	40,83	40,20	39,84
Gorontalo	34,55	31,20	30,01	2,99	2,88	3,41	40,85	43,83	40,61
Sulawesi Barat	27,75	23,99	24,81	2,66	2,76	2,01	39,06	39,88	40,99
Maluku	29,08	26,75	32,45	1,87	1,08	1,15	44,97	46,05	44,63
Maluku Utara	32,02	28,39	26,95	1,95	2,57	3,36	43,55	43,61	43,37
Papua Barat	36,61	37,05	35,65	1,63	1,97	2,76	34,95	36,85	37,07
Papua	16,69	16,54	16,50	1,28	1,11	0,82	41,74	43,07	41,93
Indonesia	36,68	36,79	36,97	3,51	3,47	3,65	33,90	33,95	34,69

Lampiran 8 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	7,29	6,01	6,89	19,03	18,39	15,67	63,59	61,91	60,15
Sumatera Utara	6,50	6,62	6,01	23,00	24,18	17,47	66,23	67,61	57,50
Sumatera Barat	8,94	11,11	9,93	15,14	14,34	12,94	64,20	64,76	64,51
Riau	5,72	6,07	7,53	14,62	13,38	12,95	52,96	51,55	54,44
Jambi	5,11	5,40	6,66	16,75	15,48	16,80	59,72	59,31	62,56
Sumatera Selatan	5,45	3,69	4,48	22,26	22,30	20,93	64,08	64,30	62,54
Bengkulu	6,48	8,51	6,37	24,42	21,78	19,80	70,67	70,41	65,79
Lampung	11,19	10,96	11,87	21,79	21,34	19,45	71,28	69,59	70,67
Kep. Bangka Belitung	4,30	4,92	6,92	11,85	12,82	12,49	51,61	52,22	51,04
Kepulauan Riau	3,56	2,80	2,82	5,44	4,88	4,43	37,31	33,77	30,88
DKI Jakarta	2,91	1,96	2,25	5,02	6,04	4,56	28,35	27,47	27,51
Jawa Barat	14,78	15,35	14,18	8,87	8,46	8,10	52,85	52,52	54,01
Jawa Tengah	13,69	15,26	13,18	14,09	13,34	14,71	62,06	63,52	64,42
DI Yogyakarta	5,13	6,71	7,62	16,85	15,13	14,75	54,09	54,70	52,88
Jawa Timur	12,71	13,33	13,03	18,80	17,09	16,45	65,71	65,04	65,08
Banten	6,38	8,15	9,92	8,17	7,03	6,12	39,13	39,88	39,57
Bali	8,67	8,65	8,94	16,10	14,92	13,31	58,09	55,70	52,32
Nusa Tenggara Barat	12,91	15,15	17,33	22,94	21,49	16,20	75,31	76,10	74,13
Nusa Tenggara Timur	5,17	4,08	3,06	34,42	34,17	28,94	81,35	79,45	78,91
Kalimantan Barat	4,46	3,88	4,97	23,21	23,85	25,09	65,56	64,32	65,42
Kalimantan Tengah	3,86	3,19	3,48	17,80	17,41	17,27	59,13	59,53	59,36
Kalimantan Selatan	5,27	6,37	6,32	16,50	17,30	17,11	63,43	65,09	63,04
Kalimantan Timur	2,71	3,16	3,99	12,28	9,97	10,12	42,54	41,38	44,07
Sulawesi Utara	12,18	9,67	13,51	11,37	10,70	8,10	60,47	58,85	57,79
Sulawesi Tengah	7,90	7,14	7,38	20,88	23,81	19,14	67,05	69,47	66,72
Sulawesi Selatan	3,84	3,93	5,55	17,96	18,66	18,78	63,02	63,93	63,55
Sulawesi Tenggara	3,00	3,70	5,42	24,19	23,53	22,59	68,02	67,42	67,86
Gorontalo	9,68	8,61	12,26	11,92	13,49	13,71	62,46	65,93	66,58
Sulawesi Barat	5,77	5,82	6,59	24,76	27,56	25,59	69,59	73,25	73,18
Maluku	1,73	2,19	3,08	22,35	23,93	18,69	69,05	72,18	66,40
Maluku Utara	5,10	4,68	5,37	17,39	20,75	20,95	66,03	69,03	69,69
Papua Barat	2,17	2,24	3,49	24,64	21,89	21,03	61,77	60,98	61,59
Papua	2,33	2,82	1,60	37,96	36,46	39,15	82,03	82,35	82,67
Indonesia	9,72	10,20	10,03	16,19	15,60	14,66	59,81	59,75	59,38

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 9 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	47,15	13,39	39,46	47,54	11,97	40,49	44,09	12,27	43,64
Sumatera Utara	48,05	11,23	40,72	50,05	11,04	38,91	42,52	15,09	42,38
Sumatera Barat	41,68	14,24	44,08	40,45	15,05	44,50	37,55	14,32	48,13
Riau	42,41	13,08	44,50	40,95	14,50	44,55	44,28	13,87	41,85
Jambi	49,35	8,09	42,56	52,35	8,16	39,49	49,38	10,23	40,40
Sumatera Selatan	52,26	11,93	35,80	54,34	10,70	34,96	53,37	10,77	35,87
Bengkulu	58,30	7,71	33,99	56,68	7,87	35,45	50,62	9,39	39,99
Lampung	48,51	12,98	38,51	50,24	13,31	36,45	48,87	13,47	37,66
Kep. Bangka Belitung	28,54	30,73	40,73	30,00	32,34	37,66	31,41	28,74	39,85
Kepulauan Riau	13,96	31,38	54,65	13,05	30,22	56,73	10,21	33,87	55,92
DKI Jakarta	2,17	19,48	78,35	1,63	19,12	79,25	0,58	19,82	79,59
Jawa Barat	19,80	29,68	50,52	20,10	29,05	50,85	19,87	29,07	51,06
Jawa Tengah	30,99	28,58	40,44	31,65	28,85	39,50	31,26	27,54	41,20
DI Yogyakarta	25,42	20,04	54,54	25,08	20,88	54,04	25,41	22,32	52,27
Jawa Timur	36,86	21,48	41,65	36,90	21,56	41,54	37,61	21,83	40,56
Banten	14,42	28,31	57,27	15,74	27,32	56,94	12,46	33,83	53,71
Bali	24,82	24,66	50,52	23,83	24,89	51,28	23,26	23,75	53,00
Nusa Tenggara Barat	45,48	13,07	41,46	48,01	13,48	38,51	43,13	15,86	41,01
Nusa Tenggara Timur	65,04	9,81	25,15	62,95	10,70	26,35	60,77	12,40	26,83
Kalimantan Barat	57,19	12,28	30,54	57,31	11,40	31,29	57,76	13,04	29,21
Kalimantan Tengah	51,59	13,99	34,42	53,29	12,79	33,92	53,11	13,06	33,83
Kalimantan Selatan	36,84	22,70	40,46	38,19	21,41	40,40	39,81	15,91	44,28
Kalimantan Timur	24,27	21,38	54,36	27,30	21,50	51,20	27,84	22,78	49,38
Sulawesi Utara	31,87	17,63	50,50	33,19	16,60	50,21	32,73	17,82	49,46
Sulawesi Tengah	46,35	14,12	39,52	47,81	13,03	39,16	47,68	11,90	40,42
Sulawesi Selatan	40,65	12,53	46,82	43,62	13,07	43,31	41,81	12,48	45,71
Sulawesi Tenggara	41,90	13,56	44,54	41,74	13,73	44,53	42,62	13,83	43,55
Gorontalo	33,34	15,53	51,13	38,53	15,10	46,37	39,24	17,01	43,75
Sulawesi Barat	59,95	9,92	30,13	62,77	6,68	30,55	56,84	10,69	32,47
Maluku	50,55	10,44	39,01	55,64	9,97	34,39	48,09	8,79	43,12
Maluku Utara	47,83	11,99	40,18	48,02	10,78	41,20	52,51	9,48	38,02
Papua Barat	48,83	12,04	39,13	45,74	12,80	41,46	45,28	12,37	42,35
Papua	73,43	3,84	22,72	74,29	3,97	21,74	70,59	4,59	24,82
Indonesia	34,56	20,76	44,68	35,10	20,63	44,27	34,00	21,16	44,84

Lampiran 10 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	587	586	570	28,95	28,87	29,49	53,26	54,91	51,54
Sumatera Utara	1 503	1 587	1 371	23,62	24,88	23,30	58,28	62,18	56,22
Sumatera Barat	570	610	548	24,33	25,68	25,15	58,67	55,56	54,29
Riau	714	766	695	26,83	28,55	27,61	49,12	49,85	44,44
Jambi	526	562	535	34,37	36,87	35,87	45,20	47,22	44,12
Sumatera Selatan	1 092	1 092	1 166	28,24	28,09	31,59	54,47	53,66	49,33
Bengkulu	251	224	225	26,37	23,87	25,95	57,28	56,93	53,63
Lampung	1 114	1 062	1 098	29,13	27,49	29,91	51,26	53,46	50,07
Kep. Bangka Belitung	136	125	127	21,82	20,27	21,04	57,29	58,56	50,66
Kepulauan Riau	111	125	86	13,14	14,67	10,51	51,33	44,56	50,86
DKI Jakarta	451	464	345	9,64	9,53	7,44	58,36	62,80	61,12
Jawa Barat	3 037	3 146	3 245	15,62	16,00	16,88	58,60	59,30	54,16
Jawa Tengah	3 571	3 484	3 713	21,32	20,56	22,44	58,04	60,99	58,53
DI Yogyakarta	472	417	398	23,75	21,13	20,35	60,87	61,50	63,04
Jawa Timur	4 768	4 825	4 807	23,98	24,36	24,90	59,62	61,03	57,05
Banten	633	766	602	12,83	15,21	12,40	60,49	55,31	56,23
Bali	483	514	456	20,30	21,91	20,04	60,93	59,81	60,68
Nusa Tenggara Barat	482	485	404	21,79	21,73	19,28	60,06	63,67	56,74
Nusa Tenggara Timur	841	839	814	36,01	36,64	37,44	60,26	60,15	56,44
Kalimantan Barat	704	651	655	30,48	28,24	29,40	55,22	58,56	57,86
Kalimantan Tengah	297	296	334	24,45	24,93	28,89	57,62	55,12	50,63
Kalimantan Selatan	540	562	571	27,89	29,53	30,59	57,47	55,50	53,26
Kalimantan Timur	298	324	297	17,01	18,49	17,69	59,33	54,67	47,89
Sulawesi Utara	213	215	191	19,80	20,27	19,44	48,96	51,72	42,03
Sulawesi Tengah	368	386	369	26,54	27,87	28,54	61,34	57,72	49,64
Sulawesi Selatan	1 115	1 167	1 014	32,19	32,82	28,75	48,75	50,86	50,02
Sulawesi Tenggara	304	293	309	27,31	26,55	29,80	61,04	60,45	57,58
Gorontalo	103	115	93	20,18	22,79	19,37	57,92	51,23	56,61
Sulawesi Barat	240	273	245	40,53	44,86	41,15	53,31	50,20	50,32
Maluku	164	179	145	24,11	26,29	24,10	56,21	60,16	55,19
Maluku Utara	119	125	124	25,57	26,17	27,22	62,71	65,11	56,10
Papua Barat	101	96	86	25,72	24,07	22,77	60,23	57,27	57,89
Papua	493	494	449	30,24	30,29	27,73	54,48	52,87	54,63
Indonesia	26 401	26 855	26 087	22,34	22,59	22,76	57,06	57,98	54,67

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2,00	2,08	3,81	9,93	7,44	8,62	15,92	15,72	18,35
Sumatera Utara	2,23	1,43	2,02	6,10	6,40	5,52	13,10	13,29	12,46
Sumatera Barat	3,15	2,36	3,20	7,02	7,81	7,57	13,87	14,33	14,35
Riau	1,24	1,10	2,79	7,02	7,48	6,70	12,94	13,00	12,98
Jambi	2,43	1,36	2,83	6,11	7,16	7,17	16,70	16,35	19,49
Sumatera Selatan	2,98	1,70	2,48	6,28	5,21	5,25	14,55	12,79	18,00
Bengkulu	2,18	2,82	3,10	7,15	5,91	6,43	11,03	11,35	13,70
Lampung	1,45	1,23	2,25	7,13	6,04	6,54	16,00	13,56	16,42
Kep. Bangka Belitung	2,53	2,31	3,27	3,38	4,46	4,54	10,85	10,36	11,82
Kepulauan Riau	2,30	1,57	2,00	2,59	2,87	2,65	4,96	6,99	5,41
DKI Jakarta	1,34	0,87	1,56	2,61	2,01	2,13	3,35	4,31	3,57
Jawa Barat	1,97	1,30	2,31	4,43	4,18	3,76	9,59	8,13	9,59
Jawa Tengah	3,29	1,86	2,97	6,34	5,78	6,07	10,56	10,39	11,03
DI Yogyakarta	2,01	2,23	2,35	7,36	6,81	7,46	10,24	8,77	8,36
Jawa Timur	1,43	1,27	1,82	7,25	6,69	6,84	11,88	11,36	12,47
Banten	1,37	1,36	2,09	3,06	3,58	4,12	7,14	7,76	7,47
Bali	2,28	0,81	1,93	4,30	4,96	4,31	8,17	7,84	7,88
Nusa Tenggara Barat	2,50	2,90	2,79	11,12	8,88	9,04	13,53	14,95	15,25
Nusa Tenggara Timur	2,58	2,41	3,77	9,51	10,13	11,22	18,35	17,05	17,84
Kalimantan Barat	1,78	1,75	2,15	3,94	5,46	5,14	19,04	18,91	18,04
Kalimantan Tengah	1,34	1,77	2,11	5,90	6,30	5,56	13,11	13,24	15,34
Kalimantan Selatan	2,47	2,71	2,63	5,55	5,05	6,82	13,70	14,63	14,32
Kalimantan Timur	1,72	1,30	2,01	3,92	4,49	3,81	7,54	6,96	8,70
Sulawesi Utara	2,57	2,27	2,33	5,65	4,62	4,14	11,30	10,40	11,45
Sulawesi Tengah	3,57	3,55	4,19	7,58	9,78	8,62	14,50	13,54	13,61
Sulawesi Selatan	3,47	2,07	2,75	9,74	9,66	9,05	15,62	14,39	13,57
Sulawesi Tenggara	2,95	2,81	3,51	9,39	7,23	9,37	14,19	14,83	15,34
Gorontalo	3,49	2,45	3,69	7,42	7,44	5,32	9,18	10,21	11,22
Sulawesi Barat	4,28	3,10	3,95	15,38	17,21	15,45	19,41	20,85	19,91
Maluku	4,96	2,65	3,30	7,42	7,15	4,95	14,62	15,25	16,01
Maluku Utara	3,43	1,71	3,09	6,82	8,71	7,80	14,98	14,64	14,29
Papua Barat	2,10	2,62	3,20	5,26	5,54	4,52	11,71	12,55	13,12
Papua	0,68	0,66	0,48	5,08	3,76	3,16	18,03	19,76	15,01
Indonesia	2,19	1,61	2,41	6,16	5,87	5,83	11,67	11,22	11,97

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014
(lanjutan)

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	17,75	20,82	17,65	13,14	12,72	11,45	21,78	19,94	21,10
Sumatera Utara	14,24	15,40	13,60	13,77	13,09	11,14	27,19	27,46	32,70
Sumatera Barat	12,71	13,98	14,99	11,76	9,65	10,26	26,27	24,49	24,32
Riau	14,79	15,43	15,57	9,96	8,95	9,36	26,95	26,98	27,34
Jambi	22,29	22,70	18,83	14,32	14,90	13,44	20,35	20,65	20,51
Sumatera Selatan	18,05	18,19	18,74	11,60	12,50	10,67	22,67	22,80	22,40
Bengkulu	15,94	13,68	15,93	11,58	11,57	12,06	28,33	31,49	26,04
Lampung	14,95	15,83	14,39	10,82	10,43	10,56	24,85	25,55	24,98
Kep Bangka Belitung	13,88	12,53	12,59	9,90	10,87	11,03	35,90	39,21	33,30
Kepulauan Riau	9,51	8,10	5,73	9,24	7,56	5,52	39,61	37,44	42,92
DKI Jakarta	5,09	5,20	4,34	4,39	5,11	3,74	51,28	49,05	51,71
Jawa Barat	11,29	11,66	11,64	8,16	8,74	8,41	35,86	36,97	36,17
Jawa Tengah	12,05	11,72	12,50	9,17	9,20	9,08	31,64	32,13	30,34
DI Yogyakarta	11,30	10,00	9,61	10,03	8,31	9,33	31,96	36,01	34,87
Jawa Timur	14,22	14,27	14,27	10,12	10,41	9,53	27,90	28,35	28,00
Banten	8,83	9,47	8,83	6,05	5,89	7,15	46,91	44,68	45,07
Bali	10,49	11,14	10,39	9,49	7,53	8,87	27,98	28,85	30,62
Nusa Tenggara Barat	14,97	12,29	15,79	11,04	9,04	11,27	20,54	24,28	20,85
Nusa Tenggara Timur	20,68	20,13	19,83	14,76	12,46	13,26	22,64	22,20	22,39
Kalimantan Barat	15,49	14,18	16,19	10,99	11,34	11,38	29,29	29,49	28,59
Kalimantan Tengah	15,30	15,03	16,61	10,83	11,57	11,70	28,91	28,01	24,26
Kalimantan Selatan	17,84	19,14	16,92	13,73	11,75	11,67	24,46	23,64	24,78
Kalimantan Timur	10,90	11,63	11,11	11,14	10,88	10,63	27,31	28,72	27,54
Sulawesi Utara	11,26	11,94	12,23	10,82	11,56	10,24	36,19	38,15	36,21
Sulawesi Tengah	14,60	14,75	16,33	13,15	11,94	12,22	23,63	25,71	23,14
Sulawesi Selatan	16,18	17,29	14,19	10,11	9,41	10,07	22,45	23,80	26,26
Sulawesi Tenggara	15,22	15,59	16,54	12,38	11,59	11,08	20,80	20,52	21,17
Gorontalo	13,34	14,12	12,44	9,11	10,06	10,38	19,81	22,24	22,65
Sulawesi Barat	19,80	22,68	17,10	11,34	10,83	10,69	16,26	13,15	16,12
Maluku	15,90	17,85	16,29	13,00	15,79	13,42	26,04	23,78	21,09
Maluku Utara	17,08	18,59	18,57	14,63	11,19	14,64	24,81	28,57	25,18
Papua Barat	19,05	15,75	17,05	14,55	14,62	12,47	25,43	26,80	27,89
Papua	26,27	23,98	24,60	17,88	19,72	19,86	18,95	20,93	25,81
Indonesia	13,45	13,62	13,40	10,09	9,97	9,66	30,38	30,84	30,76

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014
(lanjutan)

Provinsi (1)	49–59 jam			60 jam ke atas		
	Februari (20)	Mei (21)	Agustus (22)	Februari (23)	Mei (24)	Agustus (25)
Aceh	11,15	12,05	11,14	8,34	9,23	7,88
Sumatera Utara	11,40	11,44	11,92	11,96	11,49	10,64
Sumatera Barat	14,25	16,04	14,98	10,98	11,34	10,34
Riau	15,40	15,33	13,79	11,70	11,73	11,47
Jambi	10,05	10,33	11,62	7,74	6,55	6,11
Sumatera Selatan	13,77	16,19	12,86	10,11	10,62	9,60
Bengkulu	16,10	16,83	13,51	7,68	6,35	9,21
Lampung	16,66	18,63	17,34	8,14	8,73	7,53
Kep. Bangka Belitung	16,51	14,88	14,58	7,06	5,38	8,87
Kepulauan Riau	19,33	21,21	18,72	12,47	14,26	17,05
DKI Jakarta	14,72	14,54	14,22	17,21	18,91	18,71
Jawa Barat	15,34	15,65	14,46	13,36	13,37	13,65
Jawa Tengah	16,76	18,55	17,70	10,20	10,37	10,32
DI Yogyakarta	18,27	19,20	16,95	8,82	8,67	11,06
Jawa Timur	16,41	16,58	16,25	10,79	11,07	10,83
Banten	15,41	14,70	12,84	11,23	12,56	12,44
Bali	20,68	22,79	21,18	16,61	16,08	14,81
Nusa Tenggara Barat	15,27	18,01	15,92	11,03	9,65	9,10
Nusa Tenggara Timur	6,28	9,69	6,11	5,20	5,93	5,58
Kalimantan Barat	11,22	12,15	11,70	8,25	6,72	6,81
Kalimantan Tengah	13,32	13,16	14,58	11,30	10,92	9,84
Kalimantan Selatan	13,95	12,80	13,24	8,29	10,28	9,61
Kalimantan Timur	17,36	16,13	16,66	20,11	19,89	19,53
Sulawesi Utara	13,50	11,02	11,89	8,72	10,04	11,50
Sulawesi Tengah	14,11	12,86	12,91	8,87	7,87	8,98
Sulawesi Selatan	12,41	13,89	14,40	10,02	9,49	9,70
Sulawesi Tenggara	15,95	17,39	14,13	9,11	10,04	8,85
Gorontalo	19,48	18,09	20,29	18,18	15,39	14,00
Sulawesi Barat	10,03	8,22	11,78	3,51	3,96	5,01
Maluku	9,79	8,98	12,76	8,26	8,55	12,16
Maluku Utara	11,33	10,76	9,28	6,93	5,83	7,15
Papua Barat	12,35	9,58	10,23	9,56	12,54	11,52
Papua	5,93	5,77	5,06	7,18	5,42	6,02
Indonesia	14,93	15,58	14,78	11,13	11,29	11,19

Lampiran 12 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2014

Provinsi (1)	Formal			Informal		
	Februari (2)	Mei (3)	Agustus (4)	Februari (5)	Mei (6)	Agustus (7)
Aceh	40,72	41,72	44,21	59,28	58,28	55,79
Sumatera Utara	38,83	37,68	47,34	61,17	62,32	52,66
Sumatera Barat	41,99	42,07	42,85	58,01	57,93	57,15
Riau	51,29	52,56	50,38	48,71	47,44	49,62
Jambi	44,84	45,84	42,20	55,16	54,16	57,80
Sumatera Selatan	39,69	39,92	41,76	60,31	60,08	58,24
Bengkulu	35,05	35,22	38,83	64,95	64,78	61,17
Lampung	35,90	36,73	34,73	64,10	63,27	65,27
Kep. Bangka Belitung	53,64	53,08	54,49	46,36	46,92	45,51
Kepulauan Riau	67,33	69,93	73,35	32,67	30,07	26,65
DKI Jakarta	76,31	78,14	78,40	23,69	21,86	21,60
Jawa Barat	54,02	54,10	53,20	45,98	45,90	46,80
Jawa Tengah	44,89	43,96	43,22	55,11	56,04	56,78
DI Yogyakarta	55,09	54,34	53,94	44,91	45,66	46,06
Jawa Timur	41,63	42,32	41,63	58,37	57,68	58,37
Banten	66,08	65,41	65,64	33,92	34,59	34,36
Bali	50,29	53,58	55,61	49,71	46,42	44,39
Nusa Tenggara Barat	30,93	30,43	31,49	69,07	69,57	68,51
Nusa Tenggara Timur	21,95	24,38	24,89	78,05	75,62	75,11
Kalimantan Barat	38,47	39,68	37,74	61,53	60,32	62,26
Kalimantan Tengah	46,67	45,33	44,76	53,33	54,67	55,24
Kalimantan Selatan	43,49	41,72	43,07	56,51	58,28	56,93
Kalimantan Timur	63,84	64,87	61,21	36,16	35,13	38,79
Sulawesi Utara	44,49	45,03	45,78	55,51	54,97	54,22
Sulawesi Tengah	40,17	37,27	38,87	59,83	62,73	61,13
Sulawesi Selatan	43,72	42,81	42,45	56,28	57,19	57,55
Sulawesi Tenggara	39,29	39,15	38,93	60,71	60,85	61,07
Gorontalo	44,34	39,92	39,73	55,66	60,08	60,27
Sulawesi Barat	35,14	30,47	32,36	64,86	69,53	67,64
Maluku	35,15	30,55	36,95	64,85	69,45	63,05
Maluku Utara	38,46	35,83	34,41	61,54	64,17	65,59
Papua Barat	41,09	42,86	43,27	58,91	57,14	56,73
Papua	19,90	19,65	19,27	80,10	80,35	80,73
Indonesia	46,41	46,53	46,76	53,59	53,47	53,24

Lampiran 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,53	7,12	6,75	7,07	7,29	7,15	7,78	11,16	9,02
Sumatera Utara	4,95	7,30	5,95	5,24	7,26	6,10	5,41	7,52	6,23
Sumatera Barat	5,84	7,04	6,32	5,80	6,03	5,89	6,18	7,00	6,50
Riau	4,33	6,27	4,99	4,10	5,74	4,67	5,62	8,52	6,56
Jambi	2,08	3,27	2,50	2,14	2,21	2,16	4,21	6,73	5,08
Sumatera Selatan	4,22	3,25	3,84	3,56	3,26	3,44	5,57	3,97	4,96
Bengkulu	1,63	1,61	1,62	2,25	1,67	2,02	2,88	4,42	3,47
Lampung	4,53	6,05	5,08	3,31	8,01	5,05	4,09	6,10	4,79
Kep. Bangka Belitung	2,85	2,32	2,67	2,70	3,14	2,85	4,56	6,37	5,14
Kepulauan Riau	3,88	8,00	5,26	5,06	8,37	6,17	5,60	8,87	6,69
DKI Jakarta	9,63	10,17	9,84	8,28	10,79	9,26	7,90	9,45	8,47
Jawa Barat	8,51	8,97	8,66	8,52	9,29	8,78	8,07	9,21	8,45
Jawa Tengah	5,66	5,15	5,45	5,58	5,53	5,55	5,55	5,86	5,68
DI Yogyakarta	2,67	1,60	2,16	2,12	0,96	1,59	3,88	2,65	3,33
Jawa Timur	3,98	4,08	4,02	3,87	4,24	4,02	4,31	4,01	4,19
Banten	9,94	9,75	9,87	9,60	9,81	9,67	9,02	9,15	9,07
Bali	1,73	0,95	1,37	1,29	0,86	1,09	2,19	1,55	1,90
Nusa Tenggara Barat	5,52	5,00	5,30	3,83	2,71	3,34	6,41	4,85	5,75
Nusa Tenggara Timur	2,24	1,65	1,97	2,24	1,77	2,03	3,23	3,30	3,26
Kalimantan Barat	2,56	2,49	2,53	2,57	2,17	2,41	4,04	4,04	4,04
Kalimantan Tengah	2,45	3,15	2,71	3,47	3,31	3,42	3,25	3,24	3,24
Kalimantan Selatan	4,01	4,06	4,03	4,02	4,45	4,19	3,94	3,56	3,80
Kalimantan Timur	8,04	10,59	8,89	9,70	7,19	8,91	6,71	8,87	7,38
Sulawesi Utara	4,93	11,85	7,27	5,25	10,57	7,07	6,03	10,71	7,54
Sulawesi Tengah	2,94	2,90	2,92	2,83	3,37	3,04	3,13	4,68	3,68
Sulawesi Selatan	4,92	7,30	5,79	4,78	6,83	5,55	4,26	6,41	5,08
Sulawesi Tenggara	1,94	2,40	2,13	2,59	2,85	2,70	4,11	4,93	4,43
Gorontalo	1,81	3,47	2,44	3,15	2,74	3,00	3,89	4,72	4,18
Sulawesi Barat	1,22	2,15	1,60	0,51	1,62	0,98	1,16	3,43	2,08
Maluku	4,81	9,30	6,59	6,48	6,81	6,61	9,20	12,69	10,51
Maluku Utara	4,00	8,47	5,65	3,93	5,19	4,40	4,39	6,93	5,29
Papua Barat	3,36	4,28	3,70	4,80	3,91	4,48	4,71	5,55	5,02
Papua	3,49	3,48	3,48	4,92	2,77	4,03	3,56	3,28	3,44
Indonesia	5,62	5,84	5,70	5,54	5,90	5,68	5,75	6,26	5,94

Lampiran 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen),
2014

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,70	4,34	5,91	10,09	12,08	14,07	7,47	7,79	9,95
Sumatera Utara	4,86	4,64	4,02	8,47	8,56	9,03	4,01	6,84	8,68
Sumatera Barat	4,45	4,99	4,64	10,57	8,35	9,89	5,66	4,50	7,69
Riau	2,39	2,95	4,31	8,33	5,98	9,35	8,32	9,14	10,84
Jambi	1,30	1,23	2,81	5,15	3,61	9,43	2,58	4,40	8,44
Sumatera Selatan	2,31	1,95	2,61	6,72	6,69	10,78	7,45	5,98	6,16
Bengkulu	0,75	0,88	1,90	2,43	3,16	6,15	4,84	5,64	5,31
Lampung	3,80	4,01	2,95	9,37	8,96	9,66	3,46	2,78	5,85
Kep. Bangka Belitung	1,44	1,66	3,60	5,27	4,65	8,44	4,96	6,72	6,66
Kepulauan Riau	3,90	5,90	4,80	8,19	8,88	9,20	3,12	0,00	3,11
DKI Jakarta	11,20	11,80	10,10	11,50	9,10	8,70	4,75	5,47	5,31
Jawa Barat	8,20	8,40	6,55	10,80	11,10	14,27	5,51	4,97	4,78
Jawa Tengah	4,82	5,44	4,74	7,59	6,33	9,67	5,75	4,42	3,42
DI Yogyakarta	0,85	0,16	1,42	3,29	3,92	5,65	3,42	0,55	4,48
Jawa Timur	3,12	3,04	2,71	7,57	7,24	8,73	2,22	3,43	3,74
Banten	12,30	9,76	7,98	9,01	11,74	12,35	1,85	4,24	4,85
Bali	0,21	0,28	0,90	3,24	2,03	3,09	1,86	2,44	2,89
Nusa Tenggara Barat	5,10	2,38	3,47	6,83	6,92	12,45	2,79	2,41	6,69
Nusa Tenggara Timur	1,11	0,86	1,58	4,91	5,80	7,67	5,03	5,44	8,49
Kalimantan Barat	1,38	1,64	2,58	6,67	5,36	8,56	3,22	1,81	5,78
Kalimantan Tengah	2,04	2,52	2,09	3,00	3,63	6,22	6,48	9,32	4,37
Kalimantan Selatan	3,21	2,78	2,54	7,76	8,18	7,60	2,29	6,82	4,11
Kalimantan Timur	8,43	8,52	5,21	10,00	10,49	10,95	7,39	5,92	5,87
Sulawesi Utara	5,38	4,17	4,26	10,26	12,18	11,71	8,31	7,64	10,32
Sulawesi Tengah	1,37	2,25	2,15	6,63	4,92	7,05	3,87	4,11	5,70
Sulawesi Selatan	4,11	4,31	2,36	8,94	8,73	9,08	7,24	5,88	9,58
Sulawesi Tenggara	0,68	0,59	1,77	3,60	4,56	8,94	5,36	7,40	7,01
Gorontalo	1,53	1,78	2,31	5,06	6,38	10,36	4,04	6,78	7,19
Sulawesi Barat	0,52	0,94	1,93	2,91	1,63	2,71	6,97	0,00	1,99
Maluku	3,26	3,22	3,25	10,78	11,49	19,89	13,80	13,19	16,35
Maluku Utara	2,22	2,23	2,22	9,65	8,33	10,26	12,26	6,63	8,57
Papua Barat	1,78	1,34	1,76	6,45	10,59	8,05	6,96	6,69	11,36
Papua	1,72	2,68	1,77	9,17	7,85	8,44	8,55	9,49	9,88
Indonesia	4,75	4,78	4,20	8,42	8,21	10,17	4,72	4,91	5,78

Lampiran 15 Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	38,97	34,41	35,86	47,44	51,81	48,56	13,58	13,78	15,58
Sumatera Utara	47,84	44,96	35,65	45,99	45,06	51,44	6,17	9,98	12,91
Sumatera Barat	41,33	50,07	42,54	46,71	40,69	43,30	11,97	9,24	14,16
Riau	26,91	34,92	38,37	53,81	42,84	45,31	19,28	22,24	16,32
Jambi	31,64	36,77	35,47	55,76	41,08	47,54	12,61	22,15	16,98
Sumatera Selatan	40,18	38,16	34,54	43,75	47,29	53,16	16,07	14,55	12,30
Bengkulu	29,19	27,32	33,11	39,80	40,32	48,72	31,01	32,36	18,16
Lampung	51,00	54,83	41,93	43,49	40,74	48,39	5,51	4,43	9,67
Kep Bangka Belitung	36,22	38,26	45,22	49,83	43,98	42,12	13,95	17,76	12,66
Kepulauan Riau	36,86	46,85	28,65	53,83	53,15	65,60	9,31	0,00	5,75
DKI Jakarta	37,87	44,70	41,68	50,94	42,51	45,16	11,19	12,79	13,16
Jawa Barat	61,98	61,53	50,35	32,73	33,07	44,82	5,29	5,40	4,83
Jawa Tengah	64,45	72,51	60,47	28,63	22,66	35,43	6,92	4,83	4,10
DI Yogyakarta	18,55	4,91	21,52	55,28	89,73	57,22	26,17	5,36	21,26
Jawa Timur	53,40	52,02	44,91	41,56	40,74	48,32	5,03	7,24	6,77
Banten	69,12	54,85	48,70	28,37	39,37	45,11	2,51	5,78	6,18
Bali	8,64	14,23	24,95	76,24	58,27	54,01	15,11	27,50	21,04
Nusa Tenggara Barat	65,49	50,29	41,09	29,95	43,92	47,02	4,56	5,79	11,89
Nusa Tenggara Timur	43,64	32,11	35,69	38,13	46,20	41,34	18,23	21,69	22,97
Kalimantan Barat	40,08	49,37	46,20	50,43	45,29	43,40	9,49	5,34	10,40
Kalimantan Tengah	50,64	49,62	43,72	24,88	24,85	43,81	24,48	25,53	12,47
Kalimantan Selatan	56,95	47,79	46,19	38,09	39,54	44,14	4,96	12,67	9,67
Kalimantan Timur	45,17	48,34	36,60	43,23	43,21	54,11	11,60	8,45	9,29
Sulawesi Utara	42,17	33,71	30,42	45,37	53,60	53,95	12,46	12,69	15,64
Sulawesi Tengah	30,47	50,00	38,39	55,92	37,11	44,18	13,61	12,89	17,43
Sulawesi Selatan	42,84	48,92	28,26	39,51	36,30	42,72	17,65	14,78	29,02
Sulawesi Tenggara	18,62	12,61	23,60	46,55	47,07	54,81	34,83	40,32	21,59
Gorontalo	44,63	44,15	40,24	37,45	36,31	42,74	17,92	19,54	17,02
Sulawesi Barat	22,56	68,44	66,26	38,70	31,56	23,79	38,73	0,00	9,95
Maluku	30,10	29,86	16,42	42,87	47,91	59,70	27,04	22,23	23,88
Maluku Utara	23,18	31,04	24,82	44,81	51,63	54,44	32,01	17,33	20,74
Papua Barat	29,07	17,98	19,53	43,61	61,14	47,87	27,32	20,88	32,59
Papua	37,48	50,80	39,18	44,52	31,05	43,38	18,00	18,15	17,43
Indonesia	53,35	54,08	45,01	38,35	37,36	45,48	8,30	8,56	9,51

Lampiran 16 Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	50,39	50,83	56,71	36,03	36,26	31,53	13,58	12,91	11,75
Sumatera Utara	57,64	57,38	55,31	34,86	34,77	36,47	7,50	7,85	8,22
Sumatera Barat	65,12	65,79	65,86	22,48	23,76	23,07	12,40	10,45	11,07
Riau	66,57	53,54	63,14	27,30	36,92	29,78	6,13	9,54	7,07
Jambi	56,48	63,87	65,61	33,15	23,18	25,79	10,37	12,95	8,60
Sumatera Selatan	67,90	66,71	71,75	25,44	23,76	22,43	6,66	9,53	5,83
Bengkulu	64,77	62,43	62,80	27,79	23,84	28,71	7,44	13,73	8,50
Lampung	70,27	72,54	70,79	24,13	17,89	22,02	5,59	9,57	7,19
Kep. Bangka Belitung	75,72	69,60	70,14	19,73	23,50	24,00	4,56	6,90	5,85
Kepulauan Riau	56,59	60,98	58,26	33,45	28,21	35,99	9,96	10,81	5,75
DKI Jakarta	37,68	31,25	46,21	50,45	55,11	33,18	11,87	13,64	20,61
Jawa Barat	79,31	80,99	82,94	13,82	12,54	12,96	6,87	6,47	4,10
Jawa Tengah	79,41	81,86	80,51	15,10	13,99	15,93	5,49	4,15	3,56
DI Yogyakarta	53,90	64,36	51,02	28,20	27,21	38,21	17,90	8,43	10,78
Jawa Timur	79,53	77,33	80,22	15,47	16,98	15,44	5,00	5,69	4,35
Banten	72,01	72,32	75,74	19,76	20,98	18,08	8,23	6,70	6,18
Bali	54,76	62,74	58,75	37,74	31,25	32,98	7,50	6,01	8,27
Nusa Tenggara Barat	70,32	76,09	74,81	20,69	17,37	19,40	8,99	6,54	5,79
Nusa Tenggara Timur	79,95	74,82	74,21	16,73	19,58	20,06	3,32	5,60	5,73
Kalimantan Barat	74,69	78,45	80,39	17,69	16,94	15,35	7,61	4,61	4,26
Kalimantan Tengah	64,63	65,69	69,47	26,61	25,81	22,69	8,76	8,50	7,84
Kalimantan Selatan	80,53	83,55	76,63	15,56	13,06	17,42	3,91	3,39	5,96
Kalimantan Timur	53,79	57,10	66,12	37,28	35,95	26,77	8,92	6,95	7,11
Sulawesi Utara	65,99	57,87	64,31	31,44	31,07	30,96	2,57	11,06	4,73
Sulawesi Tengah	69,73	68,17	73,44	19,17	23,64	21,63	11,10	8,19	4,93
Sulawesi Selatan	51,33	57,43	60,45	32,13	24,22	25,05	16,54	18,35	14,50
Sulawesi Tenggara	51,16	56,61	59,35	30,50	28,07	30,52	18,34	15,32	10,13
Gorontalo	76,67	69,48	81,46	18,91	24,04	14,86	4,41	6,48	3,69
Sulawesi Barat	68,52	70,26	58,00	27,99	27,33	32,82	3,49	2,41	9,18
Maluku	65,03	67,53	61,71	31,15	28,28	31,26	3,82	4,19	7,03
Maluku Utara	67,98	63,51	62,79	24,56	27,02	30,61	7,46	9,47	6,59
Papua Barat	67,82	67,06	64,91	24,60	27,33	27,78	7,58	5,61	7,32
Papua	88,43	86,31	88,25	10,07	12,31	10,41	1,50	1,38	1,34
Indonesia	72,31	72,33	73,85	20,58	20,45	20,11	7,11	7,22	6,05

Lampiran 17 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2014

Provinsi	Februari	Mei	Agustus
(1)	(3)	(4)	(4)
Aceh	1 154	1 159	1 244
Sumatera Utara	2 498	2 504	3 079
Sumatera Barat	1 043	1 031	1 245
Riau	1 387	1 400	1 562
Jambi	791	814	824
Sumatera Selatan	1 567	1 582	1 758
Bengkulu	333	350	418
Lampung	1 682	1 659	1 901
Kep Bangka Belitung	318	327	336
Kepulauan Riau	423	418	454
DKI Jakarta	2 388	2 230	2 538
Jawa Barat	11 786	11 640	12 459
Jawa Tengah	7 262	7 088	7 635
DI Yogyakarta	797	831	824
Jawa Timur	8 659	8 789	9 429
Banten	2 764	2 712	3 024
Bali	656	705	776
Nusa Tenggara Barat	967	1 002	1 113
Nusa Tenggara Timur	836	896	1 014
Kalimantan Barat	912	932	998
Kalimantan Tengah	463	493	547
Kalimantan Selatan	748	790	853
Kalimantan Timur	855	873	1 014
Sulawesi Utara	594	616	707
Sulawesi Tengah	561	569	668
Sulawesi Selatan	2 252	2 181	2 274
Sulawesi Tenggara	463	474	538
Gorontalo	265	270	296
Sulawesi Barat	243	234	248
Maluku	361	365	431
Maluku Utara	249	248	272
Papua Barat	166	160	185
Papua	408	409	454
Indonesia	55 853	55 749	61 119

Lampiran 18 Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	17,00	51,92	34,68	16,99	51,87	34,65	19,20	54,26	36,94
Sumatera Utara	14,69	38,89	26,96	14,74	38,80	26,94	16,77	48,65	32,93
Sumatera Barat	14,51	43,78	29,42	15,44	42,01	28,98	19,75	49,35	34,81
Riau	14,43	52,92	33,12	14,67	52,86	33,21	16,77	57,79	36,69
Jambi	15,60	52,25	33,49	16,63	52,83	34,31	16,15	53,54	34,41
Sumatera Selatan	13,80	42,66	28,04	14,84	41,91	28,20	15,63	47,09	31,15
Bengkulu	14,11	37,56	25,62	14,21	39,77	26,76	17,41	46,54	31,71
Lampung	12,30	47,55	29,45	12,76	46,04	28,96	14,63	52,38	33,01
Kep. Bangka Belitung	13,52	54,60	33,16	14,89	54,63	33,89	14,91	56,03	34,55
Kepulauan Riau	11,80	53,45	32,17	10,86	53,22	31,58	13,82	55,17	34,05
DKI Jakarta	14,96	48,15	31,51	13,83	44,96	29,36	16,06	50,74	33,39
Jawa Barat	15,16	56,56	35,64	14,75	55,82	35,06	17,18	57,70	37,23
Jawa Tengah	15,09	42,52	29,07	14,73	41,40	28,32	17,07	43,07	30,32
DI Yogyakarta	22,30	33,76	28,16	20,90	37,26	29,26	19,07	38,40	28,95
Jawa Timur	14,56	43,68	29,48	14,95	44,08	29,87	16,19	46,83	31,88
Banten	15,67	52,06	33,53	14,70	51,41	32,72	16,70	56,35	36,16
Bali	15,22	27,57	21,39	15,61	30,25	22,93	17,45	32,74	25,09
Nusa Tenggara Barat	14,24	42,81	29,29	16,58	42,53	30,25	19,13	46,19	33,37
Nusa Tenggara Timur	17,12	34,40	25,96	18,55	36,44	27,71	20,00	41,67	31,09
Kalimantan Barat	14,85	41,21	27,79	15,24	41,84	28,30	16,29	44,35	30,07
Kalimantan Tengah	12,18	43,58	27,07	12,80	46,21	28,65	14,70	50,03	31,44
Kalimantan Selatan	11,49	42,84	27,05	14,31	42,78	28,44	14,59	46,75	30,54
Kalimantan Timur	13,23	50,57	30,77	11,29	53,76	31,23	16,58	57,74	35,90
Sulawesi Utara	13,96	54,50	33,86	16,08	54,68	35,02	20,24	60,53	40,01
Sulawesi Tengah	13,92	43,09	28,21	13,49	44,08	28,47	15,34	51,89	33,24
Sulawesi Selatan	17,85	56,44	37,98	17,21	54,52	36,68	19,77	54,67	37,96
Sulawesi Tenggara	15,23	42,46	28,95	16,17	42,59	29,47	17,84	48,24	33,13
Gorontalo	17,18	50,11	33,75	17,07	51,24	34,27	18,75	55,34	37,16
Sulawesi Barat	14,98	42,44	28,82	15,50	39,45	27,58	14,85	42,82	28,94
Maluku	19,28	47,01	33,16	19,00	47,74	33,38	23,81	54,34	39,08
Maluku Utara	17,89	49,91	33,57	18,29	48,68	33,17	19,37	53,58	36,12
Papua Barat	15,81	43,99	28,95	13,73	43,77	27,74	18,53	46,82	31,70
Papua	12,59	27,31	19,46	11,61	28,35	19,42	14,17	29,51	21,33
Indonesia	14,96	46,63	30,83	14,95	46,32	30,67	16,95	49,78	33,40

Lampiran 19 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	55,98	56,66	54,75	31,75	30,68	31,13	12,28	12,66	14,12
Sumatera Utara	58,55	59,03	55,25	32,30	32,09	35,48	9,14	8,88	9,27
Sumatera Barat	58,71	59,16	59,55	27,93	28,74	28,47	13,36	12,10	11,97
Riau	56,17	55,24	58,33	32,26	33,41	31,80	11,56	11,35	9,87
Jambi	60,69	64,49	64,18	27,09	24,62	25,60	12,21	10,89	10,22
Sumatera Selatan	66,73	67,29	65,61	24,99	24,33	24,49	8,28	8,38	9,91
Bengkulu	63,05	62,65	60,61	26,56	25,76	27,52	10,38	11,59	11,87
Lampung	68,30	69,00	68,09	23,59	22,95	24,00	8,11	8,05	7,91
Kep. Bangka Belitung	67,21	65,57	64,58	25,27	26,92	25,66	7,52	7,51	9,77
Kepulauan Riau	49,68	48,95	39,97	34,59	36,89	47,69	15,73	14,16	12,35
DKI Jakarta	33,27	35,08	34,98	43,58	43,26	44,01	23,14	21,66	21,01
Jawa Barat	65,43	64,30	64,92	26,25	26,16	26,53	8,32	9,54	8,54
Jawa Tengah	72,89	74,07	72,40	20,56	19,87	20,80	6,55	6,06	6,81
DI Yogyakarta	47,13	47,98	50,42	36,30	36,50	33,77	16,56	15,52	15,82
Jawa Timur	68,83	68,88	69,25	22,07	22,64	23,18	9,09	8,48	7,57
Banten	55,51	54,37	55,31	31,09	32,43	33,12	13,40	13,20	11,56
Bali	56,67	56,23	52,82	32,20	31,43	33,29	11,13	12,34	13,88
Nusa Tenggara Barat	68,10	70,76	68,07	23,24	21,20	21,71	8,66	8,04	10,22
Nusa Tenggara Timur	77,57	75,78	73,64	15,30	16,14	17,54	7,14	8,08	8,82
Kalimantan Barat	73,44	72,51	72,27	19,11	20,37	20,47	7,45	7,12	7,26
Kalimantan Tengah	67,30	67,28	67,92	22,48	23,37	22,82	10,22	9,35	9,26
Kalimantan Selatan	71,50	71,95	68,98	19,77	20,26	22,08	8,73	7,79	8,95
Kalimantan Timur	47,61	50,57	51,84	38,43	36,71	36,48	13,96	12,72	11,68
Sulawesi Utara	56,99	57,14	53,84	32,11	31,12	34,73	10,90	11,74	11,43
Sulawesi Tengah	65,07	67,55	65,71	24,65	22,91	23,04	10,27	9,54	11,25
Sulawesi Selatan	60,29	62,99	60,70	25,59	23,07	23,91	14,12	13,94	15,39
Sulawesi Tenggara	58,65	57,44	59,20	27,54	27,87	27,16	13,82	14,69	13,64
Gorontalo	71,12	74,29	72,84	18,05	17,07	17,26	10,83	8,64	9,90
Sulawesi Barat	69,91	71,28	71,32	21,21	18,95	18,27	8,88	9,77	10,41
Maluku	60,85	61,30	53,12	26,23	27,56	31,54	12,92	11,14	15,34
Maluku Utara	59,01	61,19	59,10	26,24	27,29	28,09	14,75	11,52	12,81
Papua Barat	60,47	60,16	55,78	25,01	25,86	29,83	14,51	13,98	14,39
Papua	75,76	76,37	76,22	16,91	15,93	17,71	7,33	7,70	6,07
Indonesia	63,99	64,25	63,65	25,98	25,85	26,58	10,03	9,90	9,77

Lampiran 20 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014

Lapangan Usaha	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 319 035	820 542	1 225 675	1 379 389	878 224	1 273 151	1 402 699	925 513	1 293 505
2	3 114 981	2 907 368	3 099 772	3 438 927	2 800 910	3 398 410	3 474 547	2 942 757	3 448 002
3	1 811 330	1 205 595	1 593 805	1 794 620	1 388 258	1 650 776	1 927 994	1 403 925	1 737 621
4	2 452 028	2 331 811	2 441 991	2 733 693	2 192 568	2 676 825	2 639 697	2 279 074	2 609 639
5	1 788 546	2 007 305	1 797 004	1 944 756	2 298 100	1 957 179	1 842 929	2 287 079	1 862 171
6	1 604 160	1 178 644	1 437 260	1 617 979	1 294 271	1 493 273	1 696 287	1 367 794	1 567 419
7	2 217 898	2 194 993	2 215 624	2 201 987	2 317 935	2 213 072	2 336 269	2 373 005	2 340 062
8	2 765 632	2 747 162	2 760 118	2 757 724	2 667 658	2 730 280	2 811 474	2 730 049	2 787 567
9	2 533 164	1 750 155	2 153 079	2 472 740	1 802 697	2 148 803	2 480 644	1 805 146	2 160 627
Total	2 065 294	1 551 915	1 885 815	2 072 480	1 636 990	1 921 379	2 115 072	1 644 458	1 952 589

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014

Lapangan Usaha	Februari			Mei			Agustus		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 472 630	1 145 669	1 225 675	1 585 591	1 167 733	1 273 151	1 407 011	1 260 602	1 293 505
2	4 112 825	1 900 052	3 099 772	4 512 398	2 000 231	3 398 410	4 821 528	2 173 551	3 448 002
3	1 719 890	1 258 490	1 593 805	1 821 056	1 252 585	1 650 776	1 867 934	1 327 201	1 737 621
4	2 885 854	1 648 699	2 441 991	3 012 521	1 802 734	2 676 825	2 815 446	1 998 499	2 609 639
5	1 993 979	1 441 285	1 797 004	2 062 147	1 749 026	1 957 179	2 047 982	1 491 818	1 862 171
6	1 540 016	1 063 004	1 437 260	1 594 449	1 115 726	1 493 273	1 673 473	1 096 871	1 567 419
7	2 485 679	1 539 916	2 215 624	2 439 010	1 560 256	2 213 072	2 565 399	1 636 000	2 340 062
8	2 992 418	1 623 274	2 760 118	2 980 942	1 530 596	2 730 280	2 976 694	1 689 214	2 787 567
9	2 308 551	1 790 794	2 153 079	2 312 151	1 763 223	2 148 803	2 318 348	1 803 007	2 160 627
Total	2 083 499	1 451 969	1 885 815	2 132 360	1 465 986	1 921 379	2 141 850	1 514 434	1 952 589

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 806 821	1 576 408	1 731 183	1 764 450	1 607 926	1 709 621	1 774 938	1 714 430	1 753 751
Sumatera Utara	1 750 767	1 534 584	1 676 004	1 803 707	1 593 707	1 733 225	1 833 122	1 509 880	1 730 339
Sumatera Barat	1 939 195	1 795 816	1 881 098	1 944 946	1 740 329	1 860 936	1 959 921	1 703 652	1 861 014
Riau	2 187 134	2 002 132	2 134 079	2 223 320	1 815 456	2 104 558	2 206 692	1 778 790	2 089 740
Jambi	1 884 525	1 503 491	1 764 244	1 818 620	1 479 970	1 705 531	1 892 222	1 740 027	1 844 704
Sumatera Selatan	1 753 307	1 282 414	1 596 162	1 837 138	1 217 954	1 627 107	1 900 868	1 667 763	1 820 905
Bengkulu	2 064 465	1 578 290	1 867 602	2 002 052	1 615 820	1 847 633	2 019 242	1 660 036	1 888 086
Lampung	1 693 333	1 326 362	1 564 318	1 571 193	1 376 345	1 502 597	1 797 969	1 496 871	1 695 552
Kep. Bangka Belitung	2 087 042	1 566 615	1 933 808	2 103 826	1 644 223	1 968 291	2 089 795	1 642 200	1 963 690
Kepulauan Riau	2 828 017	2 561 745	2 744 863	3 125 901	2 591 466	2 953 084	3 711 878	2 616 902	3 371 942
DKI Jakarta	3 170 590	2 384 748	2 871 802	3 142 573	2 505 745	2 907 645	3 146 622	2 483 226	2 906 219
Jawa Barat	2 070 636	1 515 986	1 900 760	2 018 013	1 727 965	1 930 804	2 062 306	1 707 562	1 950 345
Jawa Tengah	1 557 914	1 109 196	1 378 134	1 561 117	1 108 104	1 379 964	1 596 315	1 129 938	1 408 241
DI Yogyakarta	1 896 435	1 446 697	1 690 938	1 908 270	1 458 730	1 712 148	1 904 565	1 460 626	1 724 646
Jawa Timur	1 673 407	1 196 316	1 490 826	1 703 185	1 317 765	1 559 219	1 746 745	1 278 808	1 574 956
Banten	2 571 199	1 943 546	2 366 672	2 599 126	2 094 493	2 430 525	2 533 041	2 104 649	2 396 002
Bali	2 086 253	1 588 813	1 883 179	2 051 238	1 586 824	1 870 524	2 073 797	1 655 067	1 908 186
Nusa Tenggara Barat	1 808 685	1 469 797	1 692 031	1 691 902	1 371 323	1 580 915	2 041 830	1 456 986	1 829 422
Nusa Tenggara Timur	1 841 382	1 678 586	1 784 355	1 817 291	1 908 377	1 850 099	1 885 578	1 678 921	1 808 374
Kalimantan Barat	1 931 814	1 577 399	1 831 499	1 963 059	1 706 071	1 889 693	2 054 414	1 719 178	1 954 650
Kalimantan Tengah	2 177 724	1 794 736	2 065 872	2 250 813	1 866 866	2 137 804	2 192 645	1 861 323	2 094 590
Kalimantan Selatan	2 444 596	1 411 412	2 149 149	2 338 509	1 471 725	2 097 715	2 359 900	1 708 269	2 160 629
Kalimantan Timur	3 090 285	2 139 938	2 823 438	3 043 511	2 205 974	2 820 003	3 088 267	2 009 649	2 819 213
Sulawesi Utara	1 906 266	2 410 320	2 077 495	2 035 988	2 144 224	2 074 617	2 178 380	2 097 990	2 150 512
Sulawesi Tengah	1 985 523	1 548 577	1 831 205	1 953 651	1 566 804	1 812 647	1 987 608	1 781 225	1 910 130
Sulawesi Selatan	2 078 912	1 561 014	1 887 418	2 121 783	1 641 278	1 943 289	2 199 648	1 603 702	1 978 161
Sulawesi Tenggara	2 193 690	1 700 497	2 017 945	2 341 192	1 646 005	2 077 276	2 129 013	1 831 009	2 026 599
Gorontalo	1 624 520	1 583 986	1 606 871	1 843 794	1 553 705	1 716 614	1 837 800	1 538 448	1 704 388
Sulawesi Barat	1 843 822	1 568 252	1 749 757	1 739 968	1 687 273	1 719 558	2 263 345	1 681 491	2 062 204
Maluku	2 116 910	1 886 466	2 036 042	2 428 048	2 081 291	2 307 881	2 496 777	2 021 515	2 328 409
Maluku Utara	2 041 210	2 109 350	2 061 758	2 201 191	1 996 647	2 137 883	2 369 924	1 926 792	2 204 898
Papua Barat	3 004 801	1 988 494	2 729 619	2 864 795	2 232 416	2 687 843	2 891 122	2 289 808	2 730 795
Papua	2 978 830	2 465 210	2 847 628	3 307 831	2 648 836	3 128 189	3 287 953	2 730 793	3 149 950
Indonesia	2 065 294	1 551 915	1 885 815	2 072 480	1 636 990	1 921 379	2 115 072	1 644 458	1 952 589

Lampiran 23 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014

Provinsi	Februari			Mei			Agustus		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 062 616	1 510 909	1 731 183	2 116 421	1 455 339	1 709 621	2 134 934	1 501 691	1 753 751
Sumatera Utara	1 763 002	1 475 881	1 676 004	1 809 589	1 552 530	1 733 225	1 840 177	1 504 465	1 730 339
Sumatera Barat	2 077 620	1 640 093	1 881 098	2 079 700	1 618 774	1 860 936	2 060 423	1 619 396	1 861 014
Riau	2 465 641	1 742 852	2 134 079	2 521 071	1 628 989	2 104 558	2 436 621	1 720 053	2 089 740
Jambi	2 189 906	1 491 377	1 764 244	2 157 750	1 434 929	1 705 531	2 360 359	1 505 281	1 844 704
Sumatera Selatan	1 826 174	1 360 969	1 596 162	1 807 960	1 463 556	1 627 107	2 232 270	1 367 454	1 820 905
Bengkulu	2 192 171	1 535 217	1 867 602	2 186 922	1 498 063	1 847 633	2 194 059	1 572 735	1 888 086
Lampung	2 022 925	1 225 356	1 564 318	2 036 765	1 144 165	1 502 597	2 047 625	1 397 977	1 695 552
Kep. Bangka Belitung	2 095 350	1 700 805	1 933 808	2 220 780	1 541 163	1 968 291	2 113 480	1 735 120	1 963 690
Kepulauan Riau	2 838 138	1 844 900	2 744 863	2 986 399	2 652 550	2 953 084	3 499 831	1 910 495	3 371 942
DKI Jakarta	2 871 802	-	2 871 802	2 907 645	-	2 907 645	2 906 219	-	2 906 219
Jawa Barat	2 022 626	1 386 039	1 900 760	2 060 880	1 402 236	1 930 804	2 069 232	1 420 737	1 950 345
Jawa Tengah	1 467 970	1 240 351	1 378 134	1 391 494	1 361 297	1 379 964	1 473 894	1 292 029	1 408 241
DI Yogyakarta	1 773 427	1 419 393	1 690 938	1 784 411	1 472 610	1 712 148	1 807 434	1 409 563	1 724 646
Jawa Timur	1 651 212	1 152 983	1 490 826	1 796 604	1 103 386	1 559 219	1 721 697	1 242 788	1 574 956
Banten	2 540 565	1 536 380	2 366 672	2 622 807	1 521 617	2 430 525	2 538 521	1 638 351	2 396 002
Bali	1 982 494	1 631 901	1 883 179	1 979 342	1 606 685	1 870 524	2 019 804	1 625 230	1 908 186
Nusa Tenggara Barat	1 927 643	1 320 942	1 692 031	1 678 305	1 416 627	1 580 915	1 985 042	1 564 155	1 829 422
Nusa Tenggara Timur	2 202 896	1 448 533	1 784 355	2 058 528	1 693 818	1 850 099	2 197 832	1 479 006	1 808 374
Kalimantan Barat	2 054 009	1 614 026	1 831 499	2 241 907	1 589 008	1 889 693	2 166 662	1 754 767	1 954 650
Kalimantan Tengah	2 222 622	1 967 142	2 065 872	2 287 906	2 034 861	2 137 804	2 274 953	1 968 557	2 094 590
Kalimantan Selatan	2 184 921	2 100 019	2 149 149	2 286 386	1 849 109	2 097 715	2 200 492	2 112 316	2 160 629
Kalimantan Timur	3 075 879	2 171 259	2 823 438	3 135 076	2 075 337	2 820 003	3 093 978	2 202 371	2 819 213
Sulawesi Utara	2 249 806	1 772 864	2 077 495	2 247 165	1 821 901	2 074 617	2 271 457	1 936 899	2 150 512
Sulawesi Tengah	2 224 630	1 561 568	1 831 205	2 038 552	1 625 460	1 812 647	2 314 770	1 541 486	1 910 130
Sulawesi Selatan	2 156 733	1 524 952	1 887 418	2 204 035	1 609 499	1 943 289	2 269 105	1 562 297	1 978 161
Sulawesi Tenggara	2 301 083	1 726 920	2 017 945	2 313 482	1 821 614	2 077 276	2 303 727	1 769 268	2 026 599
Gorontalo	1 862 167	1 347 513	1 606 871	2 141 942	1 205 664	1 716 614	1 993 771	1 332 281	1 704 388
Sulawesi Barat	2 032 646	1 581 976	1 749 757	2 475 441	1 094 444	1 719 558	2 090 169	2 046 373	2 062 204
Maluku	2 247 200	1 714 500	2 036 042	2 352 229	2 245 546	2 307 881	2 655 739	1 732 405	2 328 409
Maluku Utara	2 278 030	1 916 359	2 061 758	2 058 483	2 202 194	2 137 883	2 329 754	2 079 512	2 204 898
Papua Barat	2 747 086	2 714 311	2 729 619	2 917 403	2 505 915	2 687 843	2 695 281	2 754 945	2 730 795
Papua	3 033 472	2 510 532	2 847 628	3 369 328	2 626 617	3 128 189	3 335 429	2 750 479	3 149 950
Indonesia	2 083 499	1 451 969	1 885 815	2 132 360	1 465 986	1 921 379	2 141 850	1 514 434	1 952 589

Lampiran 24 Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

